



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN MENGHADIRKAN DIRUT PERUM BULOG, DIRUT
PT PUPUK INDONESIA, SERTA DIRUT
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke-	:	16 (Enam Belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 21 September 2022
Waktu	:	Pukul 11.05 s.d. 13.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara I (KK-IV)
Ketua Rapat	:	Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Acara	:	Membahas Penyesuaian atau Penyempurnaan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran
Sekretaris Rapat	:	Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Set. Komisi IV DPR RI
Hadir	:	A. Anggota Komisi IV DPR RI: 32 dari 54 orang Anggota dengan rincian: 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 dari 11 orang Anggota 1. H. Sunarna, S.E., M.Hum 2. Ir. Mindo Sianipar 3. Drs. I Made Urip, M.Si 4. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 5. Maria Lestari, S.Pd. 2. Fraksi Partai Golongan Karya 5 dari 8 orang Anggota 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M. 3. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.

4. Alien Mus
 5. Ravindra Airlangga, M.S.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. KRT H. Darori Wonodipuro, M.M., IPU.
 2. Ir. H.T.A. Khalid, M.M.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS
 5. Ir. Dwita Ria Gunadi
 6. Dr. Azikin Solthan, M.Si.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
1 dari 6 orang Anggota
 1. Ir. Abdullah Tuasikal
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 6 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Drs. H. Ibnu Multazam
 4. Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
3 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Suhardi Duka, M.M.
 2. Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
 3. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.
 5. Saadiah Uluputty, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag, M.H.
 2. Ir. Alimin Abdullah
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 2 orang Anggota
 1. K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

C. Pemerintah

1. Menteri Pertanian (Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.);
2. Sekretaris Jenderal (Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.);
3. Inspektur Jenderal (Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H.);
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dr. Ir. Suwandi, M.Si.);
5. Direktur Jenderal Perkebunan (Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T.);
6. Direktur Jenderal Hortikultura (Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.);
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.);
8. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.);
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.);
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr.);
11. Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Bambang, M.M.);
12. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD (Frans Marganda Tambunan);
13. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) (Achmad Bakir Pasaman), dan
14. Kuasa Direktur Utama/Direktur Bisnis Perum BULOG (Febby Novita).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Pak Menteri Pertanian beserta semua jajarannya,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog beserta jajarannya,

Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia dan semua jajarannya,
Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Holding
Pangan ID Food beserta jajarannya, dan
Hadirin yang saya hormati,

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun tadi malam teman-teman dan teman-teman Kementerian Pertanian juga lembur sampai Jam 10, 11, oh sampai rumah Jam 11, kalau Mbak Alin Jam 12 sampai rumah.

Sesuai jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 23 Juni 2022 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2022, pada hari ini Rabu, tanggal 21 September 2022, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian dalam rangka membahas penyesuaian atau penyempurnaan RKA Kementerian Pertanian Tahun 2023 sesuai hasil pembahasan di Badan Anggaran.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.05 WIB)

Rapat kerja hari ini, kita mulai pukul 11.05 menit, itu karena tadi kita begadang ya, dan diakhiri pada Pukul 13.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan rapat; dan
6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, antara lain: membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran, kementerian/lembaga dan oleh Badan Anggaran dan komisi menyerahkan

kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagai bahan akhir penetapan APBN. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 170 ayat (2) sampai dengan (4) bahwa Anggota Badan Anggaran dari komisi bersama Badan Anggaran membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga yang telah diputuskan oleh komisi dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang bersangkutan secara tertulis. Selanjutnya, komisi bersama mitra kerja membahas alokasi anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan oleh komisi kepada Badan Anggaran untuk mendapat penetapan.

Ibu/Bapak yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan rapat kerja pada hari ini adalah berdasarkan Surat Badan Anggaran Nomor: AG/16721/AG.05.02/09/2022 tanggal 20 September 2022 mengenai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2023. Berdasarkan Surat Badan Anggaran tersebut, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kementerian Pertanian Tahun 2023 sebanyak Rp15.422.000.000.000,00 koma dua rupiah. Mengacu kepada hasil kesimpulan Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian pada tanggal 8 September 2022 yang lalu, Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2023 sebesar Rp15.422.181.379.000,00. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan RUU APBN 2023 oleh Badan Anggaran, Anggaran Belanja Kementerian Pertanian Tahun 2023 mengalami realokasi sebesar seratus koma..., eh Rp103,5 miliar menjadi sebesar Rp15.318.000.000.000,00. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Saudara Menteri Pertanian untuk memberikan penjelasan secara rinci dan mendetail terkait hal tersebut.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Saudara Menteri bersama jajarannya dalam menyusun program kegiatan dan anggaran agar melakukan penguatan kepada sentra produksi pertanian, sehingga fokus kepada peningkatan produksi dan kesejahteraan petani untuk mengantisipasi perubahan iklim dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, agar kegiatan yang berorientasi pada produksi ditingkatkan volumenya agar semakin banyak pelaku usaha pertanian yang menerima manfaatnya seperti bantuan benih berkualitas, alat mesin pertanian, pompa air irigasi, jalan produksi, pupuk, bantuan ternak, UPPO, sarana pengelolaan dan pasca panen, hingga akses permodalan.

Ibu/Bapak yang saya hormati,

Demikianlah pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasannya terkait hal-hal tersebut di atas. Kami persilakan. Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (Prof. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si, M.H.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang sangat kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI, Pak Sekjen dan segenap pejabat Kementerian Pertanian, Pejabat BUMN, dan Bapak/Ibu sekalian yang sama kami muliakan,

Alhamdulillah wa syukurillah, wa laa hawla wa laa quwwata illa billah.
Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan hadir pada acara rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Mengawali rapat kerja hari ini saya dan segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan rapat kerja hari ini, Rabu, 21 September 2022 dengan agenda pembahasan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan agenda rapat kerja hari ini, izinkan kami melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, tema yang diusung adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung Program Prioritas (PP) dan Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Pertanian akan fokus pada 4 program yaitu:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri; dan
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi; serta
4. Program dukungan manajemen.

Dengan berpatokan pada 4 program tersebut, target produksi beberapa komoditas utama Kementerian Pertanian tahun 2023 yaitu:

- Padi sebesar 54,50 juta ton;
- Jagung 23,05 juta ton;
- Kedelai 590.000 ton;
- Cabai 2,93 juta ton;
- Bawang merah 1,71 juta ton;
- Tebu 37,15 juta ton; dan
- Daging Sapi, Kerbau 465.000 ton.

Dengan melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023, strategi yang dilakukan Kementerian Pertanian adalah tetap fokus pada penyediaan pangan utama bagi penduduk Indonesia dan diikuti upaya peningkatan daya saing

produksi pertanian agar dapat mengisi pasar ekspor yang ditempuh melalui 2 strategi pelaksanaan kegiatan yaitu:

Yang pertama, kegiatan utama dilaksanakan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Perkebunan, serta Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1. Kegiatan utama di Dirjen Tanaman Pangan misalnya:
 1. Optimalisasi peningkatan indeks pertanaman padi;
 2. Pengembangan padi biofortifikasi;
 3. Pengembangan kawasan jagung untuk ekspor;
 4. Pengembangan kedelai; dan
 5. Pengembangan *integrated farm*.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dirjen Hortikultura, Dirjen Perkebunan, dan Dirjen PKH, sehingga ketersediaan pangan utama dalam produksi dalam negeri bagi penduduk pada tahun 2023 benar-benar kita mampu menjaganya.

2. Kegiatan pendukung. Strategi mendukung kegiatan utama Kementerian Pertanian tahun 2023 yang akan dilakukan oleh Dirjen dan badan lainnya diantaranya meliputi:
 1. Pengembangan Taksi Alsintan;
 2. Pengembangan logistik perbenihan;
 3. Irigasi pertanian sebagai upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; dan
 4. Penguatan kinerja penyuluh pertanian di daerah;
 5. Peningkatan peran pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian; dan
 6. Penguatan tindakan karantina.

Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi komoditas utama tersebut dan mendukung program pembangunan pertanian lainnya berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-617/MK.02/2022 dan Nomor B.577/M.PPN/D.8/ PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 ditetapkan pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15,422 Triliun. Namun demikian, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI tanggal 20 September 2022 terjadi dari alokasi eksternal sebesar Rp103,525 miliar, sehingga Pagu Anggaran Kementerian Pertanian menjadi Rp15,318 triliun.

Realokasi eksternal terjadi pada Badan Ketahanan Pangan atau Badan Pangan Nasional sesuai dengan hasil pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rencana Undang-Undang tentang APBN Tahun 2023 dimana pemindahan bagian anggaran (BA) Badan Pangan Nasional dari BA.018 Kementerian Pertanian ke BA.125 Badan Pangan Nasional.

Rincian pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15,318 triliun pada masing-masing Eselon I pasca hasil pembahasan Banggar, sebagai berikut:

- Sekretaris Jenderal Rp1,47 triliun;
- Inspektorat Jenderal Rp154,22 miliar;

- Dirjen Tanaman Pangan Rp3,09 triliun;
- Dirjen Hortikultura sebesar Rp1,03 triliun;
- Dirjen Perkebunan Rp1,14 triliun
- Dirjen PKH Rp2,88 triliun;
- Dirjen PSP Rp2,70 triliun;
- Badan Litbang Pertanian Rp814,50 miliar;
- BPPSDMP sebesar Rp946,04 miliar; dan
- Barantan sebesar Rp1,09 triliun.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja pada hari ini. Apabila diperlukan penjelasan yang lebih rinci, saya mohon perkenan Pimpinan agar pejabat Eselon I terkait dapat diberi kesempatan memberi penjelasan tambahan. Atas segala perhatian dari seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, kami paham sudah 2 hari melangsungkan FGD untuk mematangkan semua konsepsi yang ada di Kementerian Pertanian. Semoga apa yang kita capai hari ini adalah bagian-bagian dari optimalisasi yang telah kita lakukan secara bersama dengan Komisi IV. Semoga ini menjadi bahan untuk menjadi bagian-bagian yang kami mohon dapat ditetapkan pada hari ini. Kurang lebih apa yang kami sampaikan, kami menyampaikan permohonan maaf.

Terima kasih atas segala dukungan.

Wabillaahi taufiq wal hidayah.

Sekian.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullaahi wabarakaatuh,

Terima kasih, Pak Menteri.

Dari berbagai informasi dunia atau sampai di Indonesia juga dan Pak Presiden juga punya *concern* yang sangat kuat tentang krisis pangan, tetapi saya kalau kita serius dan kita dalam rangka kemarin 2 hari juga kita sudah FGD, kita mampu untuk mengantisipasi, sampai belepotan, karena ada gagang *nih*, antisipasi tentang krisis pangan yang terjadi di Indonesia.

Ada beberapa pendapat sampai katanya 2 tahun setelah ini, kita akan mengalami kekurangan pangan. *Nah*, ini yang menurut saya, meskipun dalam kalau sekarang masih kelihatannya jauh, tetapi perlu dimitigasi, perlu ada tindakan-tindakan yang harus komprehensif sehingga tidak terjadi.

Bapak/Ibu sekalian,

Itu paparan dari Pak Menteri. Saya persilakan..., *oh* ini Mbak Alien ya, tolong *bantuin* saya. Silakan para Anggota untuk memberikan tanggapannya.

KETUA RAPAT SEMENTARA (ALIEN MUS, S.H.):

Baik, kita beri kesempatan pertama yang punya partai merah, Bapak I Made Urip, dipersilakan.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi IV yang saya hormati.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Rahayu,

Rekan-rekan Komisi IV yang saya hormati,
Bapak Menteri dan seluruh jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan juga PT Pupuk Indonesia yang merupakan BUMN kita,

Nah, tema kita hari ini adalah berkaitan dengan rencana kerja untuk APBN Tahun 2023. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Menteri berkaitan dengan anggaran kita di tahun 2023 yang datang yaitu sebesar Rp15 triliun lebih. *Nah*, ini anggaran yang cukup memprihatinkan buat kita, jadi mengalami penurunan yang cukup tajam, apalagi berkaitan dengan masalah pupuk misalnya. *Nah*, kami dari PDI Perjuangan akan menyampaikan beberapa catatan untuk kita perhatikan di APBN Tahun 2023 yang akan datang dan kita memang sudah secara maraton dari dua hari yang lalu mengadakan FGD dengan seluruh jajaran Eselon I Kementerian Pertanian, maka banyak sekali hal-hal yang memang harus menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk menjaga kedaulatan pangan kita. Apalagi pada saat sekarang ini trend isu yang sampai kepada kita bahwa akan terjadi krisis pangan dan juga itu diperkuat oleh Badan Pangan Dunia (FAO) yang telah memberikan *warning* kepada seluruh negara di dunia ini untuk mengantisipasi persoalan yang berkaitan dengan pangan ini. Maka kami memberikan catatan:

Pertama, kemarin kita mendengar ada misi yang begitu besar dari Kementerian Pertanian khususnya dari Ditjen Tanaman Pangan yang akan menggarap komoditas kedelai sangat sangat ambisius saya lihat itu. Padahal kalau kita lihat dari tahun ke tahun dan juga beberapa menteri sudah menggarap kedelai ini dan kita sangat memberikan perhatian kepada produk kedelai ini. Karena apa? karena kebutuhan kita dalam negeri ini hampir 2,3 juta ton, sedangkan produksi kita secara nasional itu paling maksimal hanya 700.000 ton, *kan* 700.000 paling maksimal itu.

Saya kebetulan dengan Pak Mindo ini dari tahun '99 di komisi ini, jadi setiap menteri punya rencana besar untuk menggarap kedelai, tetapi di lapangan tidak jalan sama sekali, petani pun juga tidak punya minat untuk menanam kedelai ini, entah apa penyebabnya. *Nah*, apakah itu ambisi besar ini barangkali perlu apa kita cermati bersama, jangan sampai kita membuang-buang anggaran kemudian hasilnya tidak maksimal *gitu*. *Nah*, ini berarti menjadi catatan saya untuk Bapak Menteri ya, jadi lebih baik misalnya apa produk yang memang akan bisa menjaga ketahanan pangan kita. Kedelai ini barangkali sampai *gitu-gitu aja* itu. Pengalaman kita itu, beberapa menteri kita *udah* lalui di komisi, tidak akan pernah tercapai itu, malas para petani kita *nanam* kedelai itu. Karena begitu apa produksi melimpah harga pasti jatuh ya itu, dihantam oleh importasi kedelai. *Nah*, ini.

Nah, yang kedua, Pak Menteri, tentang konversi lahan ini, Pak Menteri. Jadi alih fungsi lahan yang begitu pasif setiap tahun ini berapa hektar lahan-lahan produktif kita, tanah-tanah kelas 1 terutama di Jawa dan di Bali juga ini tergerus untuk kepentingan di luar pertanian. Barangkali ini perlu dijaga lebih lebih efektif lagi, perlu dilindungi lahan-lahan produktif kita itu. Jadi kalau terus-menerus tidak kita lindungi, tidak diproteksi, apalagi komitmen pemerintah provinsi/kabupaten *cuek* saja dengan persoalan konversi ini, saya rasa lama-lama kita tidak akan bisa menjaga ketahanan pangan kita, apalagi menegakkan kedaulatan pangan. Sudah terbukti, walaupun kita melakukan perluasan lahan terutama di Kalimantan, BUMN PT Sang Hyang Seri juga sudah melakukan itu, *enggak* ada hasilnya. Mana hasilnya? Banyak nepotisme dan korupsi di sana, itu. Sekarang ada ambisi untuk membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah, hasilnya berapa? Jadi 1 hektar di Jawa dengan di sana, jauh *banget*. Saya rasa paling baik menjaga proteksi lahan-lahan produktif kita di Jawa ini supaya jangan banyak tergerus untuk kepentingan di luar pertanian, dibandingkan dengan mencetak sawah baru di luar Jawa yang tingkat produktivitasnya kecil sekali. Contoh Merauke *Food Estate* juga tidak memberikan harapan sebagai penjaga pangan nasional kita itu. *Nah*, itu catatan yang kedua.

Nah, yang ketiga, persoalan pupuk ini ya. Jadi pupuk ini pada saat sekarang ini banyak sekali ya daerah-daerah yang mempertanyakan karena memang mengalami apa penurunan yang begitu drastis alokasi anggaran untuk pupuk dan juga komoditas terbatas, kemudian juga yang disubsidi hanya urea dan NPK saja. *Nah*, ini barangkali keluhan-keluhan ini perlu disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Pertanian untuk dilakukan sosialisasi, beri pemahaman memang anggaran memang *segini*. Jadi APBN tidak bisa *cover* seluruh kebutuhan pupuk yang ada di daerah itu. Jawa Timur itu bisa 1,3 juta ton kebutuhannya, berapa kita bisa melakukan subsidi? Di bawah itu, paling-paling 800.000 ton. *Nah*, itu, *gap*-nya *kan* begitu tinggi sekali. *Nah*, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi di lapangan, Pak Menteri.

Nah, yang keempat, untuk perkebunannya. Ini Covid-19 ini *kan* memberikan pelajaran buat kita semuanya, contohnya saya di Bali, itu karena kita tergantung kepada salah satu sektor yaitu pariwisata, kemudian dihantam oleh pandemi, betul-betul *collaps* ekonomi Bali itu hampir minus 12%, Pak Menteri. Jadi mereka-mereka yang bekerja di pariwisata ke mana lari? Ke

sektor pertanian, pulang kampung lagi, Pak, mencangkul begitu. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah meningkatkan produktivitas perkebunan itu, baik coklat maupun kopi. *Nah*, barangkali karena ini semua pelajaran buat kita, saya rasa sektor perkebunan ini ya, subsektor perkebunan ini perlu menjadi perhatian serius buat kita di Kementerian Pertanian ini terutama kopi dan coklat ini. Apalagi trend anak muda pada saat sekarang itu untuk membuka kafe-kafe kopi, luar biasa tumbuh sekali, *nah* ini menjadi peminat anak-anak muda kaum milenial kita. *Nah*, ini barangkali, Pak Menteri, produk coklat dan kopi ini pasarnya sudah jelas dan kebutuhan dunia tentang coklat dan kopi ini terus mengalami peningkatan yang begitu tajam, jadi dua produk ini barangkali perlu mendapatkan alokasi anggaran yang cukup bagus buat kita di APBN Tahun 2023 yang akan datang.

Nah, tadi. Selanjutnya yang kelima, kemarin memang banyak sekali ya apa disampaikan oleh rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI terutama terkait dengan infrastruktur pertanian, baik JUT maupun JIT, kemudian juga infrastruktur yang lainnya terutama Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Tersier, dan juga Jalan Produksi. Ini barangkali perlu, Pak, apa ditingkatkan anggarannya karena sangat bagus sekali terutama untuk meningkatkan produktivitas kita, transportasi teman-teman di petani ini jadi bagus di lapangan, ini sangat diharapkan sekali.

Nah, yang terakhir, Pak Menteri. Program UPPO ini dalam rangka untuk menuju daerah-daerah yang organik, kemudian apa memperbaiki lahan kualitas tanah kita ini sangat efektif UPPO ini, Unit Pengolah Pupuk Organik ini, ada kandang, ada sapinya, ini sangat dinikmati oleh para penerima UPPO, demikian juga bantuan sapi betina produktif itu. Jadi, untuk saya contohnya ada satu kelompok yang sudah dapatkan bantuan sapi betina produktif sekitar 15 ekor atau sampai 20 ekor, sekarang sudah beranak semuanya, itu berarti *kan* tumbuh lagi bibit lagi 20 ekor. Ini betul-betul bagus dirasakan sekali oleh para penerima pupuk maupun juga sapi betina produktif itu.

Jadi itu barangkali catatan, Pak Menteri, dari saya Fraksi PDI Perjuangan. Jadi untuk apa menjadi perhatian kita bersama, terutama dalam rangka untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan kita.

Jadi terima kasih, Ibu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak Made, untuk catatan terkait dengan atensi komoditas yang dijadikan prioritas.

Selanjutnya Pak Hanan, silakan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri dan jajaran Eselon I yang saya hormati,
Dirut-Dirut PI, Pupuk Indonesia,
Dirut ID Food dan jajarannya yang saya hormati,

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa tentunya kita memaklumi bersama bahwa *udah lah* untuk yang kesekian kalinya kita membahas kaitan dengan RKA RKL 2024. Ke divisi-divisi, kemudian usulan-usulan, aspirasi masyarakat sudah disampaikan oleh teman-teman Anggota Komisi IV, ditambah lagi kita kemarin selama beberapa kali 2 hari mendalami dengan FGD ya. *Nah*, tentunya sebagian besar sudah dapat dipahami program kegiatan terkait dengan 2023 dimana ada titik beratnya adalah menangkap isyaratantisipasi terkait dengan krisis pangan global, sudah dibahas terkait dengan strategi, program, kegiatan, dan lain-lain secara detail.

Nah, untuk itu tentunya kami ingin mengingatkan kembali masukan-masukan yang diberikan oleh partai oleh Fraksi Partai Golkar untuk dapat diperhatikan ya, saya tidak perlu sampaikan, namun sudah dicatat oleh teman-teman dari Eselon I. Untuk ditindaklanjuti dengan mengadakan perubahan-perubahan terkait dengan masih terbatasnya anggaran 2023 sebesar lima belas koma..., Rp15.318.000.000,00 ini yang kita rasakan masih sangat terbatas, tentunya perlu diperjuangkan di anggaran perubahan nanti, Pak Menteri, supaya program kegiatan terkait dengan strategi implementasi, strategi mengantisipasi krisis pangan global itu bisa dilaksanakan.

Namun, kami juga ingin mengingatkan bahwa kita jangan hanya berorientasi terkait dengan kecukupan, dalam hal ini bagaimana dalam negeri kecukupan pangan cukup, tapi tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat tani kita ya. Untuk itu, Pak Menteri, tolong ada program upaya-upaya terkait dengan bagaimana kita menekan biaya-biaya produksi yang dialami oleh petani, begitu juga terkait dengan harga, perlu koordinasi lintas sektoral terkait dengan menjaga harga-harga supaya jangan pada saat panennya nanti akan jatuh, sehingga petani kita akan terpuruk ya terkait dengan pendapatan dan kesejahteraan.

Kemudian juga dengan adanya keterbatasan anggaran, kami menyarankan untuk kegiatan-kegiatan yang sulit atau tidak mungkin diselesaikan, kita sudah bisa inventarisir di 2023 nanti digeser saja kepada kegiatan-kegiatan yang memungkinkan, bisa direalisasikan secara cepat di tahun 2023 nanti.

Selanjutnya atas nama Fraksi Partai Golkar tentunya kami mendukung dan menyetujui program kegiatan yang dibiayai APBN untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Anggaran untuk ditetapkan.

Demikian, saya akhiri.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Masih ada yang akan menyampaikan? Pak Endro mau? Mau, Pak? Silakan. Mau panjang, mau pendek? *Oh pendek.*

F-P.GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, serta Bapak Menteri Pertanian dan jajaran yang berbahagia,

Izinkanlah Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut:

Pertama, Komisi IV DPR pada rapat dahulu meminta upaya dilakukan percepatan peningkatan populasi sapi melalui implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemakan Ternak Ruminansia besar ke wilayah negara Republik Indonesia, dan pada tahun 2023 direncanakan untuk sapi 10.000 ekor, kemudian yang lain-lain juga ada. Yang ingin kami tanyakan, Pak, berapa efektivitas dengan pemasukan sapi tersebut mengingat bahwa jumlah sapi kita ini sudah 18 juta, sedangkan yang akan dimasukkan contohnya tentang sapi adalah 10.000, presentasinya, Pak, itu hanya 0,05%, di dalam penelitian bahwa 5% ini *enggak ngaruh. Nah*, oleh karena itu, dengan adanya ini sebetulnya efektifnya itu seberapa jauh, Pak, dengan ada ini, walaupun kita tahu bahwa memasukkan ini tentunya akan lebih baik. Tetapi yang kami tanya efektivitas di dalam hal ini, ini yang pertama.

Yang kedua, Pak. Kami tentang HPP Padi, HPP Padi, kami juga menginginkan Pak adanya peningkatan HPP Padi mengingat ... (*suara tidak jelas*) sudah tidak relevan lagi karena rata-rata produsen secara nasional untuk di HP sendiri mencapai 4.780 per 17 september 2022, sedang HPP saat ini hanya 4.200 per kilo, ini yang kedua.

Yang ketiga, Pak, yang juga perlu kami sampaikan bahwa pada pertemuan sebelumnya yaitu tanggal 18 September 2022. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan penguatan kepada sentra produksi pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan kesehatan petani untuk mengantisipasi perubahan iklim. Dan pada waktu itu juga kita menginginkan bantuan benih berkualitas, alat mesin pertanian, irigasi, produksi pupuk, bantuan ternak pupuk, sarana pertanian, dan lain-lainnya. Namun, Pak, di dalam tahun 2023 ini, penguatan kalau kita baca lebih banyak dialihkan ke irigasi embung, irigasi permukaan, irigasi perpipaan, dan bangunan anomali iklim. Sedangkan kalau kita reses, Pak, ini banyak tetap masyarakat yang membutuhkan Alsintan untuk peningkatan produksi mereka, kami mohon penjelasannya.

Yang terakhir, bahwa setiap kali kita rapat, ini mencanangkan adanya swasembada gula dan itu selalu berulang dan berulang. Yang ingin kami

tanyakan, Pak, bahwa sampai tahun berapa sebetulnya swasembada ini bisa kita wujudkan.

Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi IV, dan Bapak Menteri yang terhormat. Demikianlah pertanyaan yang kami sampaikan dari Fraksi Partai Gerindra.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih. Ini sangat singkat sekali ya Pak ya. Terima kasih. Dan ini kayaknya lebih singkat lagi dari Pak Abdullah Tuasikal. Lebih singkat lagi Pak, karena Bapak minta paling dekat.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Eselon I beserta jajarannya,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam pertemuan hari ini, rapat kerja hari ini saya mewakili rekan-rekan dari Fraksi Partai Nasdem. Saya singkat aja, tapi singkat itu juga ada pikiran-pikiran, jadi masukan untuk menata secara profesional kegiatan-kegiatan kita yang selama ini dalam RDP sudah kita bahas, rapat kerja juga kita sudah bahas, bahkan FGD juga sebagai pedalaman, saya kira ini sudah menjadi masukan itu agar menata pembahasan ke depan itu tidak terlalu berlarut-larut. Untuk itu, ada berapa hal yang kami cermati.

Pertama, Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi Kementerian Pertanian telah membuat sektor pertanian menjadi kontributor utama pada Pemulihan Ekonomi Nasional dengan terus tumbuh positif, meskipun dalam masa pandemi. Kinerja sektor pertanian yang juga ditunjukkan dengan kenaikan nilai ekspor pertanian, dan nilai tukar petani, serta nilai tukar usaha rumah tangga pertanian terus menunjukkan tren perbaikan. Untuk itu, kami menyayangkan penurunan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023. Fraksi Partai Nasdem, berharap Pemerintah memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi sektor pertanian, sehingga Kementerian Pertanian dapat meningkatkan kinerja untuk terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Yang kedua, Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan anggaran ketahanan pangan tahun 2023. Kami berharap

penambahan anggaran tersebut dapat meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan yang berkualitas dan harga terjangkau dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri untuk mengantisipasi krisis pangan yang terjadi secara global. Perluasan areal tanaman, kampung hortikultura, dan optimalisasi pemanfaatan lahan diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

Pak Menteri yang saya hormati, beserta jajarannya,

Kami memberikan apresiasi, karena di tahun 2019 itu yang jadi pembahasan disini topik utamanya adalah impor beras, tapi Pak Menteri beserta jajarannya di tahun 2020-2021 itu kita udah *surplus*. Kita memiliki tanah yang sangat cukup luas ya, ada sawah irigasi sekitar *tiga juta delapan ratus sekian* hektar, sawah non irigasi *tiga juta sekian* hektar, tegalan *sebelas juta sekian* hektar, ladang *sejuta sekian* hektar, kurang lebih kita *duapuluh juta sekian* hektar. Pekerjaan untuk jagung, kedelai, saya kira *nggak* terlalu ribet, itu dengan pekerjaan irigasi pengolahan sawah. Produksi sawah yang sudah ada Pak Menteri, itu kita sudah harus selalu tingkatkan, walaupun ada penambahan penggarapan sawah baru, tapi sawah-sawah yang sudah ada yang terus terang saja bahwa irigasi saluran primer maupun sekunder itu tidak ada di Kementerian Pertanian. Padahal di mana-mana udah sawah yang sudah begitu bagus, airnya kering karena aliran airnya irigasinya kurang, itulah akhirnya dia pindah fungsi. Pindah fungsi ini, saya juga mengapresiasi karena ada istilah daur pipanisasi dan lain-lain ya sehingga ada sawah atau lahan-lahan tertentu itu bagaimana cara kita mengaktifkan. Ya, ini yang pertama, Pak Menteri, ini singkat tapi ya saya kira perlu saya jelaskan saya sampaikan.

Jagung, Pak Menteri, saya kira jagung *nggak* sulit ya, tapi masukan-masukan kita juga saya yakin Pak Menteri beserta jajaran *nggak* mampu laksanakan semuanya, tapi kita harus mempunyai skala prioritas. Karena apa, Pak Menteri? kalau jagungnya kurang, sekarang juga jagungnya agak kurang, itu berarti pakan ikan di mana-mana kan agak susah. Kalau jagung di Maluku itu sudah sekarang udah sekitar Rp8000,00 sampai Rp10.000,00 sehingga dia dampak pada peternakan ayam dan lain-lain. Untuk itu, saya usulkan juga, itu ada wilayah penyangga kalau di Buru ini kan ada kurang lebih sekitar 600 Ha, ya mungkin sudah pernah di apa ada survei ke sana untuk jagung dan kedelai. Saya kira ini pintu masuk dan lain-lain, ya tidak perlu banyak, tapi yang penting kita mulai. Saya kira kedelai dan semuanya sama, untuk itu kami dari Fraksi Partai Nasdem ya memberikan apresiasi ya ...*(suara tidak jelas)* apresiasi terus ya kita apresiasi kepada yang ya benar-benar berhasil ya. ...*(suara tidak jelas)* kemarin itu memang terus terang saja ya memberikan pikiran pencerahan untuk kita tahu ini sebenarnya Kementerian Pertanian ini mau kemana, tapi setelah ada ... *(suara tidak jelas)* dan lain-lain, ini sudah saya kira mungkin ya rentang ada kala ya ada kala juga Dapil-dapil dapat yang agak kurang enak, tapi saya kira semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat.

Saya kira ini aja Pak Menteri. Sekian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ya. Terima kasih.

Memang Kementerian ini, ada saatnya diapresiasi juga ada saatnya dikritik, karena tugas kita ini adalah memuji dan mengkritik. Nanti kalau muji terus, *wah* DPR ada apa-apanya nih sama Menteri katanya begitu, padahal *mah* tidak ada apa-apanya, yang ada apanya. Pak siapa, Bapak silakan, mau Pak Mindo dulu? Kayaknya Pak Mindo dulu, kita *ngalah deh*, sekarang tuh orang tua dulu didepankan, yang muda belakangan ya, yang muda masih banyak harapan.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Menteri dan teman-teman sekalian,

Ini menyimpang dari Raker ini, tetapi dia mendesak sifatnya, mendesak sifatnya. Ini ID Food, adik saya apa ngomong sama dia, aku ragu dia. Ini soal pelaksanaan G20, Pak Menteri G20 itu kan di November ya? Apa yang bisa kita ambil di sana saya terpikir sudah lama, kita harus kenalkan ke dunia, Sapi Bali. Jadi harus masuk daging Sapi Bali itu dalam menu seluruh apa di sana, seluruh tempat tinggalnya ya hotel-hotel, baru kita lihat apa kelemahan Sapi Bali ini? ternyata Sapi Bali selama ini susah masuk di restoran besar, Pak, karena dia alot katanya. Sekarang sudah ada teknologi nutrisi, teknologi nutrisi dan sudah *proven* itu bisa lunak dan kalau dilayukan 5 hari marbling, Pak, ya, kalau sapi dari luar itu dua minggu dia melayukan biar marbling, ini 5 hari. Nah, saya minta peran sertanya ID Food lebih intensif dan Dirjen PKH mengawal program dadakan ini, ya.

Saya dan beberapa teman LSM membuat program dadakan di Bali namanya program ini Sapi Bali untuk dunia. *Nah*, uang-uang kita udah keluar *nih*, Pak, hanya demi plasma nuftah kita, kita jelaskan ke dunia. *Nah*, saya yakin Pak Menteri bisa dengan segera menginstruksikan dan nanti kan akan kita periksakan di laboratorium Pak ya, bagaimana kualitasnya ini setelah ini. Jadi memang harus ada *event-event* kita buat di sana sebelum G20 itu untuk para peserta, targetnya seperti itu. Jadi kita harus masuk sapi itu dijelaskan di dalam menu itu sapi asli Indonesia gitu ya, biar ada sedikit kita ya ke dunia. *Nah*, ini ID Food, kalau sudah ketawa-ketawa gitu Pak Frans harus komit ya ketawanya ya. Jangan hanya di depan Pak Menteri *lho*, ini janji itu Pak Menteri, kalau dia ketawa begitu, janji, itu yang pertama.

Yang kedua, sebagaimana diketahui, ratusan tahun penyedia ayam broiler, kita sadari bahwa protein hewan yang termurah itu dari telur dan dari karkas ayam. Selama ini kita sepenuhnya tergantung dari 4 negara ya 4

negara, bersyukur zamannya Bapak sudah apa merilis ya ada yang broiler Indonesia kan begitu Gunsu itu ya dari Gunung Sindur sana, harus kita buat bantuan dorongan, Pak, kurangi importasi GPS-GPS dari perusahaan-perusahaan besar itu supaya tumbuh ini, karena perusahaan ini harus didukung oleh negara karena permainannya antarnegara, Pak, triliun Dolar ini permainannya. Jadi Bapak sudah apa mengumumkan itu khas dirilis Indonesia jangan tanggung Pak, kita dukung, jadi tolong Gunsu itu dibuat aturan lebih lanjut, Pak Dirjen Kehewanan ya dukunglah itu.

Terima kasih. Terima kasih, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik. Sudah selesai.

Selanjutnya silakan yang muda, yang berbakat, ya bakat bicara.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Kebangkitan,

Iya, memang salam kebangkitan.

Pak Menteri yang saya banggakan, saya hormati,
Perum Bulog atau yang mewakili, Pupuk Indonesia, ID Food,
Pimpinan yang saya hormati,
Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati,

Rapat kerja kali ini adalah membahas anggaran tahun 2023. Saya kira untuk besaran pagu anggaran, udahlah kita tidak bisa ngutik-ngutik lagi karena sudah diputuskan di Badan Anggaran, tinggal penajaman-penajaman di Eselon I yang kemarin sudah kita dahului oleh FGD-FGD, sebagian sudah kita tajamkan. Hanya saya akan berbicara beberapa hal.

Ada komoditas itu yang sudah ditanam masyarakat dan bahannya ada dan melimpah, yang kita kira kita belum begitu memperhatikan secara seksama. Misalnya rimpang, rimpang itu saya tidak tahu itu tugasnya Kementerian Pertanian Hortikultura apa tidak, tetapi rimpang ini kan masih menjadi komoditas yang yang kurang menjadi perhatian, rimpang itu. Rimpang itu misalnya jahe, kunir, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya porang. Porang ini adalah komoditas yang awalnya seperti emas, emas putih atau emas hijau, ketika Pak Menteri mengunjungi Kabupaten Madiun sama Pak Presiden, itu begitu gegap gempita dan masyarakat apa namanya ambisi untuk

menanam porang, tapi belakangan harganya jatuh. *Nah*, ini untuk perlu dicarikan jalan keluar, misalnya yang rimpang itu bantuan kepada petani rimpang alat apa namanya *slice* mengiris, terus porang ini bagaimana kemitraan atau dijalin kemitraan antara petani porang karena petani porang ini betul-betul terhimpit harga itu sekitar 1.700, 1.800 di tempat saya, Kabupaten Ponorogo.

Yang kedua, ada tanaman komoditas pertanian itu yang bisa ditingkatkan, tidak perlu menambah lahan. Misalnya jagung, karena sekarang sudah ditemukan semacam teknologi untuk membuat jagung yang tongkol 1 menjadi tongkol 2. Ini Pak Wandu sudah pernah bercerita, kebetulan saya juga sudah pernah praktek, kalau itu ditingkatkan dan betul-betul diawasi tapi ini kira-kira saingannya korporasi besar, korporasi besar tidak menginginkan jagung itu nanti bertongkol dua besar-besar. *Nah*, ini sudah ada teknologi sehingga itu tinggal tinggal mensosialisasikan dan membimbing masyarakat karena bahan-bahan apa namanya *booster*-nya itu bisa dibuat dari daun-daun sekitar, dari daun-daun sekitar, alam, dari alam.

Yang selanjutnya itu, komoditas itu memang harus perlu pupuk untuk meningkatkan hasil itu, padi itu kan belum ada varietas yang bisa panen katakanlah 14 ton per hektar, itu kan belum ada. *Nah* untuk itu, untuk meningkatkan produktivitas ini satu-satunya itu adalah pupuk, sementara pupuk kondisinya seperti ini. Kita sudah tahulah, siapa yang salah kita tidak tahu, tiba-tiba kontraksi pupuk ini luar biasa, dari subsidi ke non subsidi, dari subsidi, subsidi saja, misalnya Urea sama NPK. Prakteknya, kenyataannya dilapangan kita tidak tahu kalau dari data kementerian kita tidak tahu, tetapi ini praktek di lapangan itu untuk mencari pupuk subsidi beberapa wilayah, itu kesulitan dan ada pupuk subsidi yang dijual oleh oknum di lapangan, kemarin sudah kita kita apa namanya sudah ditindaklanjuti oleh Pak Menteri. *Nah*, ini saya berharap agar masalah pupuk, ini bagaimana yang penting ada, dan saya berharap juga untuk pupuk non subsidi, kita bekerjasama dengan komisi-komisi lain dan kementerian lainnya untuk dibuat harga eceran tertinggi, pupuk non subsidi. Kenapa gas bisa, BBM bisa? kan harga BBM di SPBU itu *kan* fluktuatif juga yang non subsidi. Misalnya, minggu ini ketika minyak turun, harganya turun sekian yang non subsidi, ketika harga minyak dunia naik, naik. Tetapi pupuk ini kenapa kok *enggak* bisa? mestinya bisa, khususnya yang yang produksi pupuk Indonesia, ini mestinya mestinya bisa ini pupuk itu. Ya, lihatnya ke Pak Bakir *sih* saya. *Nah*, atau ini dibanyakin pelatihan-pelatihan untuk mengganti misalnya kandungannya ZA itu apa, itu di latihlah petani-petani itu yang yang kira-kira yang dari alam yang kandungan ZA itu apa. Saya sendiri juga bingung, Pupuk Urea itu kan 54% Nitrogen, 46 *sorry* 46, yang 56 yang 54% *kok enggak* ditulis di karung itu apa sebabnya, ini kandungannya apa? misalnya Amoniak berapa, ini berapa gitu maksudnya. *Lah* iya, makanya kalau produk yang dijual di masyarakat ini misalnya di di apa kios-kios itu produk-produk makanan kan pasti garam berapa, tepung terigu berapa, kan gitu. Ini saya juga juga bertanya kepada Pupuk Indonesia, karena saya pernah ditanya oleh masyarakat yang kritis yang karung Pupuk Urea, itu Nitrogennya 46%, *nah* ini yang 54% ini kandungannya apa kita *enggak* tahu.

Terakhir, ID Food. Pak Mindo mengatakan ini holding pangan yang luar biasa lengkap sekali, seperti mau memberi makan seluruh bangsa Indonesia, semua bidang, ada gula, Rajawali, Rajawali 1, Rajawali 2, sawit, manufaktur, perikanan, angkutan juga sudah ada disini, lengkap sekali. Sementara ada Badan Pangan, yang badan pangan itu hanya regulator. Tetapi kalau kita merujuk kepada Keppres-nya pembentukan Badan Pangan, Badan Pangan bisa memerintahkan kepada ID Food, memerintahkan *lho* ya sifatnya, untuk saya sebut dengan istilah pangan sensitif agar diproduksi. Apa pangan sensitif itu? Katakanlah minyak goreng kemarin, kalang kabut juga kita mengatasi minyak goreng itu. Kenapa BUMN itu tidak ditugasi untuk produksi minyak goreng? emang ada operasi pasar ketika minyak goreng harganya tinggi, tetapi yang digunakan untuk operasi pasar itu kan yang dari *loe* lagi *loe* lagi, bukan dari cadangan yang dimiliki Pemerintah yang diproduksi oleh BUMN. Untuk itu, bagaimana kalau ini nanti ada semacam ide, ini hanya kita tawarkan ide saja untuk Badan Pangan yang belum jelas mitranya komisi berapa, kami juga. Kan saya tanya seniornya seniornya Komisi IV, Pak Mindo ini, Badan Pangan di Komisi berapa, Pak, ini? IV ya pasti ya. Itu, Ibu Ketua dan Pak Ketua, agar lobi dengan berbagai pihak agar bagaimana Badan Pangan itu akan menjadi mitra juga Komisi IV sehingga nanti akan sinergi kita pertemukan antara ID Food dan Badan Pangan sebagai regulator. Bagaimana kita cari solusi yang tepat untuk bisa menjaga pangan ini tidak hanya pangan pokok tetapi pangan yang sensitif, garam itu pangan yang pangan pokok ya.

Terima kasih, Bu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih, atas nama Ibu Ketua, saya ucapkan, sama-sama terima kasih.

Selanjutnya, ini anak muda kita yang lagi berkibar partainya, terkenal dengan daya kritisnya. Apakah masih ada kritis, hari ini? *Oh enggak* ada, jadi ikut sama yang lain katanya, tidak jadi oposisi katanya sekarang. Silakan sebelah sini, Pak, sebelah sini, Pak.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU):

Karena kemarin sudah ada foto yang di Instagram lagi viral, makanya udah aman.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Udah aman.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK PAWINDU):

Baik. Terima kasih, Pimpinan. *Enggak*. Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Kemudian Pak Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran Dirjen yang hadir pada hari ini,

Baik. Seperti yang disampaikan oleh senior-senior tadi, memang agak cukup banyak tadi penyampaian, kami pun dari Fraksi Partai Demokrat ingin memberikan catatan, tanggapan, dan masukan kepada Kementerian Kementan, Kementerian Pertanian.

Yang pertama terkait dengan hingga saat ini konversi lahan sawah menjadi non sawah dinilai masih sangat tinggi, ditambah adanya perubahan iklim berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional, mengingat anggaran di tahun 2023 cukup kecil. Oleh karena itu, kami Fraksi Partai Demokrat meminta agar anggaran tersebut bisa digunakan secara optimal untuk penguatan kepada sentra produksi pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan kesejahteraan petani untuk mengantisipasi perubahan iklim dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Yang kedua, ini terkait dengan kenaikan harga BBM berdampak cukup berat bagi para petani. Biaya produksi seperti bibit, benih, dan pupuk, dinilai semakin tinggi, sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah kering tidak pernah naik, sehingga makin membebani para petani. Karena menaikkan HPP akan terjadi inflasi untuk kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang pro pada petani. Oleh karena itu, kami pun juga berharap agar Pemerintah dalam hal ini Kementan lebih memperhatikan para petani kita.

Selanjutnya, di tengah terbatasnya kuota pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk komersil, Fraksi Partai Demokrat mendorong Kementan untuk meningkatkan penggunaan pupuk organik secara berimbang, terutama Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) yang merupakan program bantuan Kementan sejak tahun 2015, harus dioptimalkan penggunaannya. Bantuan melalui penyuluh Kementan agar memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada para petani untuk produksi pupuk organik dengan kualitas yang baik secara mandiri dengan memanfaatkan limbah organik yang melimpah ketersediaannya.

Selanjutnya, terkait dengan anggaran Kementan yang Rp15,4T, jika target sarannya benar, maka dapat memberikan perubahan pada sektor pertanian. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat memberikan pandangan:

1. Perbanyak bantuan benih;
2. Tingkatkan SDM petani melalui Demplot maupun Bimtek;
3. Manfaatkan Balai-balai yang ada di daerah;
4. Bantuan pengolah tanah harus sesuai karakteristik daerah ;
5. Perbanyak bantuan Alsintan pasca panen, termasuk pengering;
6. Perbanyak bantuan pupuk organik agar dapat mengimbangi akibat terbatasnya pupuk subsidi dan tingginya pupuk anorganik;
7. Pertanian agar dapat diserap oleh Bulog;
8. Permudah petani dalam mendapatkan KUR.

Selanjutnya, ada catatan terkait dengan kunjungan spesifik kemarin ke Kota Batu dan Malang terkait dengan produktivitas buah apel di Jawa Timur telah mengalami penurunan yang, penurunan baik kuantitas, mutu, dan ukuran. Penyebabnya adalah usia pohon apel yang sudah tua, rata-rata 44 sampai 60 tahun, unsur hara kritis, kekurangan nutrisi organik, dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida berlebihan, di samping itu juga terjadi alih fungsi lahan apel yang semula 2.500 hektar menjadi kurang dari 1.000 hektar. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar Kementan memberikan solusi atas permasalahan petani apel di Kota Batu, Jawa Timur.

Terakhir, catatan untuk Kementan terkait dengan pertanian tebu. Jumlah pabrik gula rafinasi terlalu banyak akibat kemudahan persyaratan mendirikan, penyebabnya *supply and demand* menjadi tidak seimbang. Tidak semua pabrik gula rafinasi memiliki mitra dan menjalankan kewajiban menyediakan dalam, menyediakan tebu dalam Undang-Undang Perkebunan. Permasalahan itu di hulu, permasalahan di hulu, produksi tebu dalam negeri rendah 67 ton per hektar. Dan biaya produksi sangat mahal, indeks biaya produksi gula di Indonesia mencapai 192 poin, sementara berhasil hanya 100.

Dalam rangka mendukung target produksi gula nasional, kami, Fraksi Partai Demokrat mendorong Pemerintah untuk melakukan intensifikasi dengan menyediakan bibit tebu yang berkualitas dan konsolidasi lahan yang meningkatkan produktivitas. Harus ada sistem pembiayaan petani tebu yang mendukung *cash flow* menjadi dua atau tiga bulan, karena petani tebu harus menunggu selama 10 bulan bisa mengantongi pendapatan.

Mungkin itu saja Pimpinan dari kami Fraksi Partai Demokrat. Kurang lainnya, mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Saya mau, Pak Ibnu *enggak* ada ya? *Enggak*, rapat. *Enggak*, saya mengingatkan pada tanggal 24 Januari 2022 kita rapat, dan salah satu rekomendasinya adalah, saya bacakan ya.

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi pupuk non subsidi, untuk mengendalikan harga yang melonjak akibat kenaikan bahan baku dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk guna meningkatkan produktivitas lahan petani.

Artinya, sebenarnya sudah dibicarakan juga, tapi memang kita belum tahu nih progresnya seperti apa. Itu saja Pak Menteri.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Iya. Yang berikutnya, Bupati Sukabumi, masa mendatang, Pak dokter hewan Slamet. Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh,*

Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Pertama, ikut bersyukur ya dalam insiden Pak Menteri beserta rombongan masih diselamatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga hari ini bisa apa bertemu lagi dengan kita. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan.

Yang pertama, karena tidak ada forum ketemu dengan presiden, sehingga saya sampaikan di forum yang terhormat ini. Betapa kontradiksinya bagaimana kemudian harapan Pak Presiden akan fokus kepada ketahanan pangan. Kemudian juga kedaulatan pangan menyongsong apa krisis pangan global, tetapi anggaran yang diberikan kepada kementerian yang menangani pangan yang hari ini Kementerian Pertanian itu pagunya terus menurun sehingga ini menjadi keprihatinan bagi PKS. Sekaligus saya yakin ini yang sudah sering disuarakan menjadi perhatian dari keprihatinan dari Komisi IV, sehingga mudah-mudahan kita berharap nanti Presiden kemudian menyuruh Menteri Kementerian Menteri Pertaniannya, Menteri Keuangannya maksudnya, ditambahkan anggaran sehingga program-program yang diharapkan untuk apa terkait dengan perut rakyat kita bisa berjalan dengan baik.

Yang kedua, kami juga ingin memastikan beberapa, Pak Menteri, ya karena anggarannya sudah ada, yang terkait. Yang pertama terkait dengan anggarannya kan berkurang Rp103 miliar, karena berkurangnya eh berkeluarnya apa Badan Ketahanan Pangan. Saya ingin memastikan saja program-program P2L itu masih nempel di hortikultura atau dibawa ke sana, ya kita *nggak* jelas komisinya walaupun saya yakin jadi dengan Mas Ravindra nanti pasti komisi itu ke Komisi VI, kemarin beliau sudah menyampaikan di mana wajah saya kalau tidak di Komisi VI eh Komisi IV, begitu, Mas Ravindra, ya. Itu mungkin.

Yang berikutnya, saya melihat ada beberapa ini, Pak, kegiatan pendukung yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri. Yang pertama, pengembangan Taksi Alsintan. Jadi kami tidak apa, jadi ada keraguan, tolong dijawab keraguan kami bahwa program ini akan berhasil. Kenapa kami ragu-ragu? di skema yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen, di situ ada KUR, di situ ada pengusaha yang mungkin baik hati bisa itu saya, dalam pengalaman kali ini untuk yang begitu-begitu KUR itu kami tidak yakin ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Menteri

bahwa keraguan-keraguan saya khususnya itu di dan kemarin diragukan beberapa temen-temen, jadi dijawab bahwa program ini realistis dan bisa berhasil.

Yang kegiatan pendukung berikutnya adalah pengembangan logistik pembenihan. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Menteri ini, terkait dengan Litbang sudah berubah fungsi, kemudian juga BRIN sudah tidak lagi dalam apa Litbangnya sudah dalam tidak lagi dalam posisi itu. *Nah*, saya ingin mendapatkan gambaran koordinasi dan teknisnya nanti bagaimana, karena ya sudah tidak menjadi rahasia bahwa koordinasi antarlembaga di kita itu sangat sangat mahal ya sehingga kami ingin meyakinkan bahwa program yang sudah dicanangkan di 2023 terkait dengan perbenihan ini bisa berjalan dengan baik.

Kemudian, kegiatan pendukung berikutnya adalah penguatan kinerja penyuluh pertanian. Saya ingin mendapatkan kepastian bagaimana nasib para PPL Pak ya, jadi antara yang ditulis ini di rencana 2023 supaya ada kepastian. Kita meyakini bahwa PPL ini adalah ujung tombak dan selama ini juga jadi ujung tombak untuk kemudian para petani kita sehingga saya sangat mendukung dengan program apa program kegiatan pendukung yaitu penguatan kinerja Penyuluh Pertanian. Dalam bentuk apa? nanti khususnya yang memang hari ini sedang berjuang honorer isunya mau dihapus, kemudian juga *nggak* jelas lagi P3K-nya juga tidak bisa menampung semuanya, sehingga ini saya pikir korelasinya sangat positif dengan program Pak Menteri di 2023 yang akan datang.

Kemudian, saya juga ingin mendapatkan gambaran sudah sejauh mana koordinasi Pak Menteri dalam rangka, karena kita bicara tentang krisis pangan ini kan pasti melibatkan banyak kementerian dan lembaga khususnya Bappenas *eh* khususnya Badan Pangan Nasional. Ini *kan* sudah setahun lebih ya kalau *enggak* salah ya sudah dilantik begitu, apakah sudah ada koordinasi untuk kemudian berbagi tugas.

Dan berikutnya, saya dari kemarin FGD sekaligus juga hari ini ingin menegaskan. Tidak ada program terkait juga dengan apa, susu, Pak ya, karena tadi saya ngobrol dengan Pak Direktur ID Food bahwa total impor kita itu pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu sebelum PMK 75% yang dulu juga saya pernah singgung sehingga *pasca* PMK ini dengan turunnya apa produksi dari tidak turun sekedar kemudian itu populasinya turun, memang daya produksinya juga turun karena efek dari penyakit itu, maka saya ingin mendapatkan langkah-langkah ini, karena kalau kita apa kaitkan dengan nanti juga *stunting* dan lain-lain ini tentunya akan berkorelasi sangat positif.

Dan, yang terakhir Pak. Tentunya baru belum lama begitu beberapa hari yang lalu ada pernyataan dari seorang Guru Besar dari IPB bahwa 50% penduduk Indonesia kekurangan sayuran, buah-buahan, pangan hewan, dan kacang-kacangan, istilahnya kelaparan terselubung. Dari sisi apa peluang, tentunya ini adalah sebuah peluang bahwa petani kita bisa produksinya kemudian terserap nantinya. Karena sangat ironis kalau kemudian saat petani kita kadang tidak tidak terbeli, tidak terserap, tetapi dalam survei ini, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa memang kekurangan sayuran, buah-buahan,

dan lain-lain. Oleh karena itu, saya mengusulkan, Kementerian Pertanian di bawah komando Pak Syahrul ini harus aktif mengkoordinir bagaimana kemudian seluruh bantuan-bantuan yang sifatnya sosial dari kementerian-kementerian lain diarahkan kemudian bisa melakukan penyerapan dari pro apa komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh petani kita, khususnya tadi adalah terkait dengan sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan ya sehingga, kalau kemudian ini nanti bekerjasama dengan Kemendes atas inisiasi dari proaktif dari Kementerian Pertanian, saya pikir ini petani kita juga akan bisa tersenyum karena kemudian terserap dengan sekaligus juga menjawab tantangan ini. *Nah* ini mungkin perlu dipikirkan terkait dengan itu.

Dan terakhir ini, saya ingin mendapat eh kepada Pak Direktur ID Food ini, kira-kira juga perannya apa dalam rangka menyongsong, menghadapi krisis pangan global dalam yang di apa dihadapi oleh kita semuanya ini.

Demikian, Ibu Ketua. Terima kasih, Pak Ketua, Pak Gubernur, *eh* Pak Gubernur, mudah-mudahan ya. Terima kasih, Pak Menteri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih, Pak Bupati ya, terima kasih.

Nanti besok kita rapat lagi, bantuan keuangannya disiapin lebih besar buat Sukabumi ya. Ini yang terakhir *nih* Kyai kita, yang paling konsen pada pertanian di Tasik dari, sekarang lagi hadir dan ini ingin terus ditingkatkan terutama petani milenial. Silakan, Pak Kyai, Pak Kyai Asep Maoshul.

F-PPP (K.H. ASEP A. MAOSHUL AFFANDY, M.Pd.I.):

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Assalamu ala man ittaba al-huda,*

Bapak Ketua yang terhormat dan Pak Menteri,

Pertama, Fraksi PPP menggarisbawahi tentang bantuan unggas, khususnya ayam ya. Ini ada banyak juga petani agak sedikit menolak masyarakat ini karena *enggak* ada untuk buat pakannya, *nah* makanya ini juga untuk memberikan bantuan unggas ini sertakan pula dengan bantuan pakannya, baik pakan secara langsung berupa pakan atau juga ada semacam Bimtek membuat pakan. Bagaimana bisa membuat pakan, kalau unggas itu umpamanya dengan limbah dapur ya kalau diprosesnya bagus, apalagi diberikan alat atau mesin untuk membuat pakan tersebut.

Yang kedua, di pertanian kita atau di hasil tani kita ini ada yang unik, Pak, semakin baik hasil pertanian dan semakin berlimpah hasil pertanian, maka harga semakin turun dan anjlok, ini umum sekali. *Nah*, ini tentu saja yang dirugikan adalah para petani, sampai-sampai pernah terjadi di Brebes yang petani bawang, kualitas bagus, barang berlimpah, *nggak* ada yang beli, bahkan

dikasih pun *enggak* mau akhirnya, akhirnya dijadikan aspal saking marahnya mereka. Yang kami maksudkan dalam hal ini, bagaimana Pemerintah bisa mengendalikan harga sebaik-baiknya sampai tidak merugikan kepada para petani, asal diberikan untung aja udah bagus. Lalu kemudian petani kita ini mungkin kebanyakannya adalah buruh tani, kalau buruh tani disebut namanya juga buruh, tergantung siapa yang ngasih buruhannya.

Ada yang unik, Pak, kalau tadi Pak Ketua bilang memang saya kesal, Pak, ya. Saya di pondok pesantren saya, Pak, Pondok Pesantren Miftahul-Huda pernah diresmikan ini pernah diresmikan santri tani milenial, pada saat itu ada traktor, Pak, dan sawah saya juga dikorbankan untuk praktik pada waktu itu, acaranya selesai bubar, traktornya juga bubar, Pak, janjinya *enggak* tahu kemana, menguap begitu *aja* menguap, dan saya sebagai Kyai di situ bingung ditanya oleh mereka ya. Ini bukan zamannya Pak, kalau sekarang, tapi zaman yang sebelumnya, sehingga santri milenial ini, santri tani milenial ini menjadi hilang, dan kita tahu respon atau minat anak muda terhadap petani ini sekarang ini mulai menurun, dan petani sekarang ini lebih banyak ke faktor bisnisnya. Sementara kalau tempo dulu, *enggak* ada yang namanya bisnis, yang penting pangan tersedia, makanya kalau dulu banyak lumbung-lumbung. Ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, sekarang ini *enggak* ada lumbung pribadi, jangankan lumbung pribadi, lumbung yang oleh pemerintahpun *udah enggak* ada sekarang di daerah-daerah itu, akhirnya ya sering kali habis.

Berikutnya, mengenai Badan Karantina Pertanian. Ini *enggak* boleh dipandang sebelah mata karena dampaknya kalau gagal seperti PMK kemarin, yang rugi kita semua. Bukan saja per zamannya per waktunya, tetapi juga masalah dunia kita menjadi apa namanya tercela lah, mungkin ada ...*(suara tidak jelas)* nilai yang kurang baik. *Nah*, kemudian tentu saja bukan hanya masalah hewan dalam hal ini, bukan hanya masalah PMK, juga masalah virus-virus. Saya masih ingat dulu waktu ayahanda saya bikin tanam apa namanya almarhum, tanam jeruk, satu kali panen bisa mengongkosi 3 orang ibadah haji, saya ngikut nyoba nanam jeruk pula, boro-boro untung, Pak, malah buntung. Alasannya apa? Setelah itu virus merajalela dimana-mana, sehingga di Jawa Barat hampir tidak ada. Dan satu lagi komoditas kita yang khas sekali di Indonesia salah satunya adalah jeruk Garut itu juga sudah mulai sirna, sementara itu cukup terkenal tempo dulu.

Selanjutnya, maaf karena saya perintahnya ini mendadak ini ya, jadi saya otak atik aja ini. Ini mengenai komoditas, banyak sekali komoditas-komoditas pangan yang baru ya, ada porang, terus ada apa lagi talas, ada lagi macam-macam. Saya pikir lebih baik fokus yang sudah jelas-jelas sajalah, jagung yang sudah jelas, kedelai yang jelas-jelas sangat dibutuhkan ya, saya belum pernah melihat kemanapun saya pergi belum pernah melihat hamparan yang tanaman kedelainya begitu banyak, kalau jagung sering saya lihat seujung mata memandang itu jagung ada, tetapi kalau kedelai *nggak* ada. Dan seringkali saya mengeluh, maaf, di Kuningan itu daerah produk Kopti ya Koperasi Tempe Tahu itu banyak mengeluh dan sering saya dengar itu yang namanya kebutuhan kedelai selalu saja impor, lebih banyak impor daripada produksi kita sendiri. Sementara kita negara agraris yang sangat mungkin, tapi kayaknya ini belum ada yang serius, walaupun ada yang tanam kedelai ini

hanya sebatas cemilan saja, dan ketika cemilan pun ini juga sekarang kalah dengan kacang kedelai dari produk Jepang.

Lebih baik kita fokuskan kepada kopi, kakao, sawit, ketimbang hal-hal baru. Apa lagi yang namanya bukan saya tidak setuju seperti sorgum, porang, yang lebih banyak *gambling*-nya. Kecuali kalau memang komoditas-komoditas baru tersebut menggiurkan dan memang benar-benar menghasilkan, sehingga mampu mengisi program Pemerintah tentang kedaulatan dan juga ketahanan pangan. Contoh lain juga beras, maaf, Pak, saya ini salah satu yang mungkin suka masak, salah satunya nasi kebuli, itu harganya, Pak, berasnya, Pak, berlipat-lipat. Kalau beras kita itu cuma paling mahal Rp10.000,00, Basmati yang diimpor dari India itu Rp30.000,00, masa di kita *enggak* bisa ditanam, mungkin kalau rakyat kita misalnya petani kita nanam ini, kita bisa ekspor ke luar negeri. Jadi..., dan tentu saja sebaik apapun harus dijaga juga terhadap bibit-bibit penyakit kembali kepada masalah tadi karantina, dan juga harus diwaspadai juga mengenai virus-virus dari luar.

Terima kasih. Mohon maaf.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Seluruh pertanyaan sudah selesai dari fraksi-fraksi, kalau sudah bertanya memang sudah aturannya harus didalami. Dan yang akan mendalami hanya 2 orang, itupun mewakili Indonesia, karena kalau mewakili Dapilnya ini laut semuanya.

Bu Saadiah Uluputty, silakan, Bu. Soalnya Ibu kalau posting itu pasti di kapal, bukan di sawah. Silakan, Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Pak Alimin ada? *Oh* satu lagi belum katanya, Pak Alimin. *Oh* iya lupa, satu lagi belum, Pak Alimin, lupa saya, Pak. *Waduh* PAN, Fraksi Amanah Nasional. Pak Alimin, silakan.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan yang saya hormati, dan
Seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajarannya,

Ya, saya kebetulan datang sendiri dan banyak *nggak* paham ini. Tapi ada beberapa yang saya ...(suara tidak jelas). Pertama, ternyata beras kita sudah bisa surplus, padahal menurut saya kita masih banyak kurang untuk mendukung petani. Semua kita berbicara petani masih teriak, soal bibit, soal pupuk, soal hama, *nah* jadi artinya dalam keadaan yang kurang begitu buruk pun mereka sudah bekerja baik dan menghasilkan hasil nyata, saya juga yakin begitu juga yang lain. Jadi tanah pertanian itu, Pak Menteri, memang akan cepat pindah ke yang lain kalau memang usaha pertaniannya itu tidak meyakinkan, tidak ada harapan dan tidak menentu. Kalau orang memberitahukan bahwa dia punya tanah 1 hektar sawah bisa mendapat kehidupan yang baik karena harganya pasti dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjanjikan, saya yakin dia tidak akan lepas, karena banyak orang di kampung itu sangat menghargai harta-harta nenek moyangnya, dia tidak akan jual. Tapi kalau dia lihat memang bisa kemungkinan lebih baik, maka dia jual, dia tinggalkan pekerjaan padahal belum pasti juga di tempat yang lain akan lebih baik. Jadi kalau kita mau sayang sama petani kita, saya kira sudah waktunya kita melihat prestasi mereka dan kita dukung. *Nah*, yang memang aneh itu saya *nggak* mengerti ya, saya baru masuk Komisi IV, tapi ketika saya masih di Komisi VII, Komisi I, itu selalu kalau turun ke Dapil itu yang ditanya soal pupuk, masalah. Padahal waktu saya di Komisi VII, dia bilang, ini bagaimana Komisi VII apa tidak diberikan gasnya kepada pupuk? kami bilang, kami sampai malam itu memutuskan untuk memberikan gas yang cukup dengan harga yang pantas. Tapi ternyata ya kenyataannya saya *enggak* tahu siapa yang salah, bukan mencari salah, tapi jelas petani melihat tidak ada, walaupun ada harganya jadi lain. *Nah*, begitu juga hal-hal yang lain, jadi masalah bibit, masalah semuanya dan alat-alat pertanian.

Ada yang menarik barangkali, kalau soal pertanian kita sudah bagus menanam padi dalam jenis yang kita punya, saya tertarik dengan Pak Ketua tadi itu, kenapa *enggak* kita juga tanam padi yang bisa lebih mahal dan siap *enggak* bangsa kita juga? Buktinya dalam kehidupan sehari-hari kita sanggup membeli produk dari luar negeri dari India. *Nah*, jadi kalau menurut saya kalau Indonesia sendiri yang menghasilkan, yakin saya juga kan, asal kita juga bisa memberikan *warning-lah* sama rakyat bahwa kalau dia tanam ini akan ada pembelinya. Barangkali Bulog juga harus berani untuk memulainya, agar mereka diversifikasi tanaman padinya, tidak hanya tanaman padi yang biasa-biasa saja, tapi yang padi yang mungkin padi yang buat orang obat diabet itu itu lebih mahal juga, itu hal-hal yang lain.

Nah, jadi saya kira ke terhadap kedelai ini saya *nggak* mengerti, karena sudah berkali-kali mencoba untuk kita swasembada gitu, tapi jangankan swasembada, mengurangi impor aja susah. Saya *nggak* tahu apa betul kedelai itu tidak pas tumbuh di negara kita, karena nyatanya masih ada cuman produksinya aja yang tidak meningkat. Jadi artinya, kemungkinan di negara-negara lain itu dengan teknologi dan teknik-teknik yang unggul mereka bisa berhasil menanam kedelai itu lebih baik dari kita. Kita menanam kedelai sama dengan kita menanam padi, apa adanya terus barangkali ya. *Nah*, menurut saya, kalau kita betul-betul berharap kedelai itu bisa kita penuhi kebutuhan kita, memang harus ada terobosan, Pak Menteri. Ada satu percobaan yang dibuat oleh Pemerintah menunjukkan hasil yang tinggi, *nah* baru rakyat juga mungkin

akan merubah apa tanahnya, lahannya, menanam kedelai. Seperti kata beliau tadi, sekarang orang-orang bisa nanam jagung, di Lampung itu semua orang nanam singkong karena ada pabriknya yang beli, walaupun begitu dia banyak singkongnya harga langsung turun. *Nah*, ini yang menyebabkan juga tidak pasti, sehingga lama-lama lahannya dijual juga.

Jadi saya kira yang paling bisa diharapkan dari Pemerintah itu, Pak, menjaga kestabilan harga supaya ada ada harapan petani itu akan hidup dengan pantas dan wajar dengan mengelola lahannya sebagai petani. Kalau itu tidak ada, ya lahan pun bisa berubah, dijual, *enggak* ada pilihan lain, atau dia juga *enggak* semangat untuk serius menggarap lahannya, karena percuma. Saya lihat ketika harga singkong jatuh, banyak kebun singkong itu sudah ya tidak diurus, Pak, penuh rumput dan segala macam, karena dia urus juga *enggak* ada gunanya, *enggak* balik modalnya. Jadi jelas betul petani itu yang sudah biasa bagus nanam juga dia menjadi berubah, karena harga tidak bisa kita kendalikan.

Nah, saya kira kendalian harga ini tidak hanya sekedar bahannya *aja*, pupuk, bibit, semua, tapi juga harga beli, harga jual daripada produk mereka itu Pemerintah harus membantu bagaimana caranya kebijakannya sehingga harga mereka itu pantas. Seperti harga gabah kering itu, apakah sudah pantas harga yang ditetapkan Pemerintah? apa *enggak* bisa lebih baik lagi supaya lebih semangat ini petani kita. Sebab kalau kita mengharapkan terus dari impor suatu saat barangkali orang *enggak* ekspor lagi ke negara kita, kalau orang mempertahankan apa ketahanan negaranya sendiri, apalagi dalam krisis ini. Jadi saya kira hal-hal yang sudah bagus di negara kita, kita dukung terus dan barangkali diversifikasi juga agar dia menambah lagi *income*-nya.

Saya kira itu, Pak Menteri, yang saya bisa usulkan. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa berhasil lagi di 2023 ini pertama surplus pangan.

Ada satu yang saya agak menarik, saya kurang paham tapi kemarin itu sesuatu yang agak mengganjal di saya, *cutting*. Ini sesuatu yang baru buat saya, Pak Ketua ya, betul-betul *enggak* ngerti saya. Tapi setelah saya tanya kiri-kanan, *cutting* itu semacam pembunuhan atau pembuangan dari pada ternak karena kita takut *over* produksi. Ini kan sesuatu yang *enggak* enak kedengarannya, kita sudah berusaha dan berhasil meningkatkan produksi, kemudian kita sendiri takut dan kita bunuh, ini ada apa ini kita bisa menyetujui tindakan seperti itu, saya *enggak* mengerti. Karena menurut saya, orang di kampung saya dulu, Pak, ketika zaman durian masih banyak, kalau buahnya banyak tuh dia memang *enggak* langsung dia buang, dia bisa bikin lempok, dia bisa bikin tempoyak, dan macam-macam, jadi zaman dulu pun sudah ada kearifannya. Masa' kita soal ayam aja yang kita butuhkan, terus kita ambil kebijakan *cutting*, saya *enggak* ngerti siapa yang menemukan model itu, tapi saya pribadi terus terang kurang *sreg* kalau kebijakan seperti itu hanya membunuh hewan yang kita pelihara.

Itu saja. Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Silakan, Ibu, *mangga*, yang panjang ya, Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Menteri, beserta Pak Sekjen, para Dirjen Kementerian Pertanian yang saya hormati,

Yang pertama dalam pendalaman Raker hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal, Pak Menteri. Beberapa waktu kemarin Pak Presiden berkunjung ke Maluku Barat Daya dalam lawatan panjang ke 4 kabupaten bertemu dengan para peternak di Maluku Barat Daya, mungkin gambarnya saya sajikan.

Ini Kerbau Moa, Pak, sudah sering saya sampaikan dua kali atau tiga kali disini meminta agar ada perhatian kita terkait dengan keberadaan Kerbau Moa dan juga Kambing Kisar. Kita punya spesifikasi komoditi kerbau yang cukup unggul dan tak kalah ya dengan kerbau-kerbau dari luar negeri semisal India atau Afrika, dan dalam beberapa diskusi dengan dinas setempat ya di Provinsi Maluku, mereka menyampaikan sebenarnya sudah ditetapkan sebagai plasma nutfah, Pak, tetapi kami minta agar dia juga bisa ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit, Pak Menteri, agar dengan penetapan sebagai wilayah sumber bibit, kita kemudian punya satu regulasi untuk melindungi kerbau-kerbau ini, kemudian juga bisa memaksimalkan potensi kerbau yang ada di sana, terutama juga meningkatkan kesejahteraan para peternak, Pak. Ini kerbau yang harganya di atas ratusan kilo, tetapi kadang dijual dengan harga per ekornya Rp7 juta, dan saya rasa ini tidak logis ya, tidak sesuai dengan bagaimana sulitnya memelihara kerbau ini. Beberapa usulan yang kemarin juga disampaikan kepada Pak Presiden adalah dibangunnya semacam embung sumber air di masa-masa bulan-bulan Oktober ke atas itu sering terjadi kekeringan, dan di musim-musim itu kerbau ini juga sering mati dalam jumlah yang tidak sedikit juga, juga kandang yang dibutuhkan. Dan pakan ternak yang disampaikan oleh Dinas Kabupaten Maluku Barat Daya bahwa mereka sudah mengusulkan, tapi saya minta lagi ada perhatiannya agar di tahun 2023 bisa diperhatikan untuk menjaga sumber bibit kita. Dan juga ada satu hal mungkin ya, kita membangun satu UPT Peternakan mungkin, Pak Menteri di wilayah tengah ke timur ya. Kemarin waktu saya berkunjung dengan apa namanya untuk bimbingan teknis dengan UPT apa namanya balai bibit balai peternakan di Maros ya, *nah* mereka juga sudah sampaikan bahwa ternyata kita belum punya UPT-UPT Peternakan di wilayah-wilayah Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Pak Menteri.

Yang kedua, soal mobilisasi Alsintan, Pak. Semalam saya juga sudah sampaikan ke Pak Sekjen dan Pak Dirjen ini ke daerah-daerah kepulauan Pak, karakteristik pulau-pulau. Kita agak kesulitan, Pak, soal jika kemudian ada

bantuan Alsintan ke kabupaten dan penerimanya berada di pusat kecamatan atau bahkan sampai di desa yang jaraknya jauh dengan pusat kabupaten, ini biasanya di apa serahkan kepada petani untuk memobilisasi sendiri, Pak. *Nah*, apakah tidak ada kebijakan alokasi tambahan atau khusus dari semua apa namanya kontrak yang sudah disusun untuk bisa memudahkan mobilisasi Alsintan ini dan perhatian kepada Alsintan untuk tanaman-tanaman perkebunan khusus pascapanen, Pak. Di beberapa daerah yang punya komoditi, misalnya kelapa, cengkeh, pala, banyak sekali kami mendapatkan permintaan aspirasi soal permintaan Alsintan pascapanen agar bisa kita tingkatkan dan juga menghindari beberapa bakteri dan virus untuk apa komoditi-komoditi unggulan skala ekspor, Pak Menteri.

Nah, yang terakhir soal beberapa sarana infrastruktur juga, semisal Jalan Usaha Tani untuk kawasan perkebunan yang apa namanya berbeda dengan kawasan-kawasan tanaman pangan. *Nah*, kita harapkan ada perhatian khusus juga untuk Jalan Usaha Tani di kawasan perkebunan teksturnya agak berbeda dengan di kawasan-kawasan tanaman pangan, sehingga mungkin dari sisi volume ataupun Juknis-nya itu bisa diapa ya, agak sedikit fleksibellah *gitu*. Misalnya masyarakat meminta agar misalnya di daerah perkebunan itu model ataupun pekerjaannya itu misalnya aspal, atau lapen tidak beton, atau sirtu-sirtu begitu.

Itu saja dari saya, Pak Ketua, beberapa pedalaman yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikumsalam warahmatullah wabarakatuh,

Sekarang pedalaman yang berikutnya, Pak Endro. Pak Endro. Sudah? Sudah, oh Pak Hermanto. Dikira Bapak mau pedalaman lagi, *enggak*. Pak Hermanto, mohon agak lama ya, Pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pak Ketua, Anggota Komisi IV,
Pak Menteri bersama jajaran,

Pertama, saya ingin menyampaikan tentang pembiayaan Taksi Alsintan melalui KUR. Ini dilematis, Pak Menteri ya, karena satu sisi kita memberikan penguatan modal kepada petani, tapi di sisi lain pun juga kapasitas petani baik dalam pengelolaan Alsintannya, kemudian juga kemampuan dananya, ini menjadi persoalan. Karena saya melihat kemampuan petani ini, kalau kita

misalnya menilai ya kan harga dari Alsintan yang mau dimasukkan ke dalam satu sistem Taksi Alsintan itu, kalau katakan saja *combine*. *Combine* itu ya kita ambil ada kasarnya saja itu adalah sekitar *lima ratus jutaan* lah kurang lebih. *Nah*, petani ini kira-kira memiliki dana sebesar itu *nggak* untuk bisa membeli *combine* atau atau semacam kemampuan ya untuk mem-*backup* katakan KUR-nya berapa dari Rp500.000.000,00 itu.

Nah, saya belum bisa memahami ya, karena petani kita ini *cash flow*-nya sangat bermasalah. Oleh karena itu, saya minta supaya pihak pemerintah dalam hal ini kementerian, itu bisa dibantu petani ini dengan menyusun *cash flow* yang rasional, karena di situlah nanti akan tergambar apakah petani itu memiliki sumber pendapatan dari pemanfaatan *combine* itu atautah tidak, atautah misalnya dia ada ada *cash flow* yang masuk dan keluarnya, itu kan kelihatan nanti *cash out flow* dan *cash in flow*-nya itu kelihatan. Di dalam *cash flow* itu harus tergambar juga aset yang dipunyai oleh petani, harus tergambar juga sistem produksinya, harus tergambar juga personalnya, sampai dia tuh ke pasarnya itu ketahuan bahwa dia itu dapat untung dengan itu. *Nah*, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa sebuah program Taksi Alsintan itu dibiayai dengan KUR, petani itu dianggap mampu untuk melunasinya.

Nah, sejauh ini yang saya khawatirkan, petani itu tidak memiliki pola manajemen keuangan yang baik, dia tahunya punya penghasilan dapat, kemudian beli peluang-peluang produksi yang lainnya, terus dia belanja sudah. Untuk berpikir bagaimana misalnya di situ ada *gain*, ada benefit, dan untuk apa benefit itu, biasanya beli rumah, jadi memang ini persoalan dilematis yang saya maksud ini. *Nah*, ini mohon nanti ini ada hitungan-hitungan yang tepat dan mohon dibantu kelompok tani ini dengan *cash flow*-nya, sebab kalau kita minta petani itu *nyusun cash flow* dia *nggak ngerti*. *Nah*, sehingga keraguan kami tentang pembiayaan Taksi Alsintan ini melalui KUR itu bisa rasionallah ya bisa rasional, petani tidak menderita juga, apa bank itu juga tidak menjadi repot untuk *nagih-nagih utang gitu, nagih-nagih* kreditnya *gitu*. *Nah*, kekhawatiran kami nanti bila misalnya jaminan-jaminan itu dan ternyata usahanya gagal kan jaminan itu bisa disita oleh bank dan petani sudah *enggak* ada berdaya lagi kalau setelah ini masuk ke ranah itu. Jadi memang saya berpikir kalau memang seandainya ini terjadi, maka kita pertama harus memberikan perlindungan dulu kepada petaninya supaya tidak mengalami kebangkrutan. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi saya dikasih kesempatan Ketua untuk berpanjang-panjang. *Oh* iya, jadi yang kedua...

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Enggak, itu Bu Alien *tuh* katanya Bapak itu harusnya sudah yang ketiga, ini baru urutan pertama terus katanya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Nih, kira ada Bu Alien ini, jadi saya ceritanya panjang *nih*.

Nah, yang kedua, saya ingin supaya ini G20 ini sudah sudah selesai atau belum, Pak Menteri? Belum *kan*, ada AWG-nya itu ada *Agriculture Working Group*-nya itu *kan*, sedang berjalan sekarang *kan*. Jadi nanti puncaknya *kan* Oktober ya, Oktober puncaknya, November ya. *Nah*, saya begini. Ini yang sudah ketiga kali saya bicara dengan Pak Menteri dan Pak Menteri memberi jawaban cukup meyakinkan. Saya juga hanya ingin memperkuat *statement* Pak Menteri bahwa pada saat G20 nanti itu, itu memastikan Indonesia ini berdaulat dalam pangan. Tunjukkan bahwa kita ini adalah negara yang berdaulat dalam pangan dan tidak diintervensi oleh kebijakan politik asing untuk menentukan pangan kita. *Nah*, ini persoalan mendasar buat kita, sehingga kita tergambar bahwa sektor pertanian ini betul-betul diperhitungkan oleh dunia internasional bahwa Indonesia berhasil dalam sektor pangannya, mekanisasinya, modernisasinya, segala macamnya, pengendalian iklimnya, segala macamnya itu sukses ya *kan*, dan berapa hari belakangan ini kita terus bicara tentang pangan kita dengan soal krisis pangan. *Nah*, nanti dalam pertemuan itu, ketika dunia sekarang ini dihebohkan dengan dunia akan menghadapi krisis pangan yang luar biasa, maka disitulah Indonesia menjawab bahwa Indonesia itu punya strategi, punya kemampuan untuk mengatasi perubahan iklim terkait dengan ketersediaan pangan di dalam negeri kita. *Nah*, ini, ini tunjukkan bahwa kita ini adalah sebuah negara yang punya sistem pertanian yang kuat, kokoh, untuk menopang bukan hanya pangan dalam negeri, pangan luar negeri juga. *Nah*, jadi ini yang mendasar.

Kemudian yang ketiga terakhir, ya terakhir, terkait dengan keluhan penyuluh. Penyuluh ini BOP-nya tidak memadai untuk kondisi biaya yang sekarang ini meningkat, Pak Menteri. Saya minta ini mohon diperhatikan, semoga penyuluh kita ini karena itu adalah eksistensi Menteri Pertanian di lapangan ya, ini *tuh* adalah marwah Menteri Pertanian di lapangan. Jadi saya pikir ini perlu di di apa ditambah lah untuk BOP-nya.

Demikian, Pak Menteri, Pak Ketua. Mohon maaf.

Assalamu'alaikum

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

Ini *kan* kadang kita ini bingung Menteri Pertanian Kementerian Pertanian dan seluruh jaringan petani suruh produksi, *udah* produksi diganggu oleh kelompok yang lain. Kalau saya *sih* ke depan itu, kalau mau rasional setiap kementerian itu ada Dirjen Perdagangan, sehingga dia yang mengatur produksi dan konsumsi. *Nah*, ini harusnya. Mudah-mudahanlah nanti ke depan bisa terwujud itu.

Terima kasih.

Pak Edward, ini kita harus kesimpulan *nih*, Pak. Habis ini kita harus ada FGD jam 2. Bapak mau *maksain ngobrol* juga atau sudah saja cukup?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Ini penting. beberapa menit saja, saya lihat jamnya sampai jam 12, saya stop sudah. Iya, kita komitmen. Kita komitmen. Karena saya kangen sama Pak Menteri juga sudah lama *enggak ngomong*.

Jadi, baik.

Pimpinan, serta Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bapak Menteri beserta jajarannya,
Direktur ID Food, Direktur PI yang saya banggakan,

Kita singkat saja. Jadi poin pertama itu mengenai kita sangat prihatin ya karena anggaran untuk Kementerian Pertanian selalu menurun, selalu menurun. Padahal di lihat satu sisi Kementerian Pertanian ini menjadi tulang punggung dalam sisi dalam segi pangan, ketersediaan pangan. Jadi mudah-mudahan hari ini kita RDP, Ibu Menteri Keuangan bisa mendengar, karena kita bicara singkat saja, maksudnya ditambah anggarannya supaya kegiatan di lapangan itu bisa berjalan sesuai rencana yang sudah diprogramkan, ini yang kita harapkan. Kalau dananya kurang, kita biar tekankan harus begini begitu begini begitu, tapi para Dirjen juga akan bingung kehilangan akal karena ini yang menggerakkan ini harus ada anggaran juga.

Poin kedua, mengenai keterlambatan pupuk subsidi di lapangan, ini mungkin Direktur PI bisa mengantisipasinya lebih cepat dan serius. Jadi kadang-kadang sebenarnya pupuk itu *enggak*, bukan langka, bukan kekurangan produksi, tapi distribusinya ke lapangan yang terlambat, mungkin rantai pasoknya itu ada kendala, akhir-akhir ini memang banyak kendala yang tidak terduga-duga terjadi. Iya, yang satunya itu yang mengenai harga eceran tertinggi mengenai pupuk, jadi pupuk di lapangan itu ada pupuk non subsidi ada, cuma harganya melambung, *nah* ini yang membuat masyarakat prihatin. Kalau bisa mungkin kita cari jalan keluarnya, supaya penetapan harga tertinggi pupuk non subsidi bisa kita sepakati bersama.

Poin ketiga, itu kami minta kepada ID Food agar bisa memberikan mendetail ya menjelaskan secara mendetail mengenai program yang akan dijalankan dalam mengantisipasi krisis pangan global yang akan kita hadapi nanti, karena beberapa waktu lalu kita melakukan RDP, ID Food lagi tugas keluar ya ke luar negeri. Dampak mengenai ini mengenai tanaman pangan yang yang menjadi ini pertanyaan saya, itu hama belalang yang di Sumba, Nusa Tenggara Timur itu ya mudah-mudahan Pak Dirjen bisa ditangani secara tuntas karena saya dapat berita lagi bahwa hama belalang yang 3 bulan lalu kita kesana sekarang sudah mulai dewasa, dan diperkirakan akan menganas lagi pada akhir bulan ini, jadi minta ada tim atau ada petugas yang bisa mengantisipasi itu.

Dan juga mengenai, yang satu lagi Food Estate. Program ini sebenarnya baik cuma pelaksanaannya kan belum tuntas, baru dalam tahap mulai melakukan persiapan-persiapan yang lebih menjurus. Tapi saya ingin sampaikan bahwa yang paling utama dan terutama adalah air dan saluran

distribusinya, itu yang sangat menghambat Program *Food Estate* akhir-akhir ini. Kalau Alsintan sudah oke, kalau tenaga kerjanya oke, semua sudah oke, cuma airnya yang krisis air ini yang membuat nggak bisa *action*. Jadi yang sekarang dipakai *tuh* metode atau caranya istilah pertaniannya penyiraman menggunakan Metode *Sprinkle*, *Sprinkle* ini kan kalau kita mau untuk produksi tanaman untuk kayak tanaman-tanaman besar itu katanya orang kampung itu dia bilang, ini hanya basah di permukaan aja, kecuali mau siram rumput baru pakai Metode *Sprinkle* ini. Jadi mereka minta supaya kedepannya dilakukan semacam bedeng-bedeng dan irigasi air yang mengalir di sekitar bedeng-bedeng itu sinyal proses pembasahannya sampai ke bawah, sampai ke akar bawah, jangan hanya di permukaan.

Saya kira itu itu saja yang ingin saya soroti, karena yang lain-lain dari teman-teman sudah menyampaikan. Dan saya yakin bahwa kalau program-program yang sudah disampaikan setelah kita FGD dan lain-lain, program ini akan punya harapan besar untuk berhasil, tinggal menunggu waktu tergantung waktu yang akan kita jalani nanti. Dan juga mengenai penyakit PMK itu, tolong untuk segera diperhatikan, Pak Nasrullah, sehingga jangan sampai kita timbul lagi tsunami PMK yang kedua lagi jadi sekarang penanganannya sudah agak menurun ya. Dan juga saya titip lagi kambing yang tahun 2021 itu, 2022 sudah sampai, tapi 2021 belum sampai, ini kira-kira ada titik jelaskah? ada ya.

Terima kasih banyak.

Hanya itu saja, Pak Ketua, yang perlu saya *stressing*.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Terima kasih.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Izin, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Masih ada.

INTERUPSI F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Sedikit, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Dikit ya, awas jumlahnya banyak.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri dan semua pejabat Kementerian yang saya hormati,

Saya satu saja, Pak. Sekarang dengan BBM naik, Pak Menteri. Kasihan juga sama petani, Pak. Mereka kalau harga gabahnya *enggak* naik *kan* juga kasihan. Yang lainnya bisa naik kenapa tidak naik, *kan* tentu ini perlu menjadi pemikiran juga. Mereka juga membelanja untuk biaya-biaya yang lain juga naik, dan juga BBM mereka yang digunakan untuk traktor juga tentu naik, ini juga paling *enggak* bisa menjadi pemikiran, kasihan kepada mereka, Bapak Menteri Pertanian.

Juga terkait untuk memaksimalkan teman-teman penyuluh tentunya, Pak Menteri, itu mereka bisa diberikan aplikasi langsung *direct*, Pak. Jadi istilahnya pelaporan tiap panen di setiap daerah, setiap wilayah itu bisa langsung diketahui pergerakannya di Kementerian Pertanian setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, jadi tidak tergantung data itu menunggu dari dinas, Pak. Kalau menunggu dari dinas tentu akan lama, tentu mereka bisa diberikan area, Pak. *Oh* satu penyuluh areanya berapa luas kira-kira yang perlu mereka laporkan, sehingga data panen itu bisa akurat biarpun mungkin untuk data setiap *daily report*-nya ada mungkin minggu, mungkin bulan. Dan yang tidak kalah pentingnya, Pak, mereka perlu diberikan pelatihan, bimbingan teknis, penataan tiap apakah setiap triwulan untuk bagaimana, biar ilmunya selalu bertambah dan juga selalu *upgrade*, Pak Menteri, karena memang di pertanian ini juga sangatlah dinamis perkembangannya. Tentu ini perlu ilmu-ilmu baru, terobosan-terobosan baru untuk kemajuan khususnya Kementerian Pertanian.

Mungkin itu saja, Pak Menteri. Tapi ada satu lagi, Pak Menteri. Di kami di Dapil kami di Banyumas itu ada BPTP Pak, itu domba perah, Pak, kambing perah, Pak, permintaannya banyak, Pak Dirjen tahu persis permintaannya banyak, Pak. Mereka tidak minta gratis, Pak, mereka *ngantri* itu untuk membeli *pengen* kambing perah, Pak, itu bisa setahun, bisa satu setengah tahun. Itu adalah rakyat kita yang memang serius untuk ingin beternak kambing perah, Pak. Itu sangat mengharapkan nanti populasinya untuk ditambah, dan masyarakatpun itu yang serius, Pak. Dia tidak minta bantuan, tapi malah dia beli, Pak, dan itu yang perlu kita dorong, sehingga pertumbuhan mereka bisa lebih cepat. Apabila sekarang ngantrinya setahun sampai 2 tahun, nanti bisa di-*shortcut*, Pak, waktunya, apakah mereka bisa per 2 bulan atau per triwulan, sehingga populasinya perlu ditambahkan oleh Pak Menteri.

Itu saja, Pak Ketua. Mohon maaf.

Terima kasih, *matur nuwun*, merdeka!

INTERUPSI F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua...! Ketua...! Satu dulu, Pak. Saya baru datang dari Banggar, Bu Ketua, jadi perlu bicara juga ini, *udah* lama *enggak* ketemu Pak Menteri soalnya *nih*. Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Menteri, dan jajaran saya hormati,

Sedikit *aja*, Pak. Karena kita lihat bahwa Pak Menteri punya target 3 kali ekspor, Pak, ya Gratieks (Gerakan Tiga Kali Ekspor). Saya kira ini perlu diperkuat, Pak, atas pertanyaan kita di luar negeri, Pak. Saya kemarin dari Washington, Pak, dari KBRI kita, anggaran kita di sana hanya *enggak* sampai Rp1 miliar. Bayangkan, Pak, setahun *enggak* sampai Rp1 miliar *loh* untuk promosi produk pertanian kita, Pak, ya. Ini perlu ditambah. Malaysia saja, Pak, untuk sawit saja dia punya anggaran puluhan miliar. Kita ini *kan* komoditi kita banyak sekali perkebunan kita. *Nah*, mungkin perlu penambahan anggaran, sehingga target Bapak untuk tiga kali ekspor ini bisa tercapai, Pak.

Yang kedua, Pak Pimpinan, saya kira kalau masalah anggaran sudah selesai ya. *Nah*, kita berharap apa yang menjadi target dari Pak Menteri bisa kita wujudkan, ketahanan pangan kita dan juga tercapainya swasembada pangan kita.

Demikian, Ibu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Bang Andi.

Saya kasih kesempatan sebentar, *enggak* usah lama-lama maksudnya, untuk Pak Menteri untuk menjawab semua respon dari para Anggota.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (Prof. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si, M.H.):

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV,
Bapak/Ibu sekalian yang kami muliakan,

Ingin saya sampaikan rasa hormat, terima kasih Pak Made, Pak Hanan, Pak Endro, Pak Abdullah, Pak Mindo, terus Pak Ibnu, Pak Ibu Dhevy, Pak Slamet, Pak Asep, Pak Alimin, Ibu Saadiah, Pak Hermanto, Pak Edward, Sunarno, dan Pak Andi Akmal terakhir.

Jawaban saya satu, Pak Sekjen, Irjen, semua masukan ini luar biasa dan sangat membantu kami kita di Kementan. Oleh karena itu, jawaban saya perintah saya, Bapak, kepada saya punya jajaran, Ibu, Ibu Ketua ya, semua ini harus dijawab dan saya berharap tadi masukannya hampir semua sangat bagus, Bapak. Sepanjang ada di kemampuan Kementan, lakukan itu, koordinasikan, kalau dia berhadapan dengan saya, Pak. Oleh karena itu, mohon tadi beberapa tanggapan dan arah, termasuk dari Ibu yang di Maluku

itu catat baik-baik itu. Saya berharap ini tidak, betul-betul ini sangat membantu kami Bapak, Bapak udah tahu bagaimana sulitnya 2023 besok itu, World Bank mengatakan *dark significant*, bukan *dark* biasa, *dark significant*, *unlinear*, *unpredictable*. Oleh karena itu, kekuatan bangsa ini ada di pertanian. Saya tidak mau bicara lagi anggaran, kita tabrak aja sama-sama Bapak, Insya Allah. Itu yang pertama jawaban saya *secara ilmusehingga* catatan-catatan ini menjadi sangat penting yang hari ini, Pak. Selain yang 2 hari yang kemarin, walaupun saya tidak hadir, *virtual*-nya saya ikut, Bapak. Jadi poin-poin dari kemarin saya catat, itu yang pertama.

Yang kedua, yang memang agak berat itu PPL. PPL undang-undang menempatkan di daerah, Pak, pembinaannya di daerah, fungsinya di daerah, ndak ada di sini, bahkan Bakornya kita *enggak* ada, Badan Koordinasi kita *enggak* ada. Kita kalau tanpa anggaran kesana atau menurunkan anggaran di sana salah-salah kami dapat masalah dengan pemeriksaan, karena diluar Tupoksi sudah. Tetapi kalau tanpa PPL, Kementan *enggak* punya daya itu. Jadi ini juga saya melakukan diskresi, Bapak, minta maaf, apapun Kopassus kita di lapangan *enggak nembak*. Oleh karena itu, berbagai langkah ini saya izin kalau memang forum ini sudah seperti ini karena semua bicara PPL, Bapak, kita iya *extraordinary aja* untuk direlaksasikan, Pak, dan saya siap untuk itu. Berkali-kali saya minta ke Bapak Presiden dalam Ratas untuk minta melakukan relaksasi undang-undang, karena mengubah undang-undang ini 5 tahun kemudian belum tentu, merelaksasi melalui Keppres. Tapi ini *kan* membutuhkan sebuah proses. Tetapi ini tahun, Bapak, izin, saya punya jawaban, Pak Sekjen, Pak Dirjen, kami ambil. *Udahlah*, Pak, saya turunkan bibit, kapan bibit itu *nyampe*, kapan bibit ini diantar, kapan ini bibit ditanam, bagaimana hasil tanam, *enggak* ada kalau bukan tanpa PPL. Kami *kan* cuma bagi-bagi kayak sinterklas *gitu* *enggak* ada ukurannya, dan itu dari kemarin dari tahun lalu itu sudah jalan, Bapak. Bakorluh butuh, kamipun yang harus tangannya Kementan itu harus sampai di kabupaten. Kalau tidak, *enggak* bisa, Pak. Dan itu yang 2 tahun, 3 tahun ini *alhamdulillah*, kita capai seperti itu. Jadi itu jawaban pengumuman saya, tidak hanya PPL. Tapi secara umum ini membutuhkan pengendalian. Untung saja kita sekarang ini pakai digital, Pak. Jadi pelatihan dan lain-lain ini. Jadi kesejahteraan PPL itu bukan cuma anggaran, Pak. Pelatihannya harus dimaksimalkan, dan ini lagi di jalan baik digital dan kita punya PPL yang kita butuhkan 80.000, Bapak, dan terdata sama kita ada 40 sekian. *Nah*, itu akan menjadi catatan serius, Pak Sekjen. Ya, izin kalau saya sering panggil sedikit untuk menjamin 2023, Bapak, kalau tidak kita tidak bisa kontrol yang ada. Itu yang berkait.

Kedua, kedelai, orang kita ini jangan, kedelai itu dari dulu rakyat kita tanam, Pak. Kenapa *enggak* ditanam? karena kita mau instan, mau impor, dan beri rakyat lain dapat uang *gitu*. Jadi kita tanam yuk, Pak, apapun. Dan *alhamdulillah*, kemarin kami dapat penegasan dari Bapak Presiden, beli karena persoalan kedelai orang tidak mau tanam, tidak ada pasti siapa yang mau beli ini, karena lebih murah dari luar. Kalau dia tanam terus kedelai dibeli di bawah Rp7.000,00. *Enggak* untung itu, Pak, dia harus dibeli di atas Rp6.000,00 dan harganya selama ini *kan* Rp6.000,00. Harga di Amerika hanya lima ribu lebih, imporlah kita, dan *ndak* tanggung-tanggung, impornya *udah* terlalu besar, Bapak, sebelum 46%. Padahal kita makan tempe, tahu, dan kita mulai enak

merasa tahu, kita tanam, Bapak. Saya..., ya Pak Dirjen ya, kita apapun kita tanam, Pak. *Alhamdulillah* kemarin, Pak, kemarin ini disetujui Bapak Presiden beli Rp10.000,00. Kalau harus jual, jual 5, 9.000 *enggak* apa-apa, kami beli dengan harga Rp10.000,00. *Nah*, itu bahkan diperintahkan BUMN beli ID Food, selama BUMN dengan Kementan ini bisa jalan sama-sama *alhamdulillah* beras ya atau mau merapat *aja deh*, Berdikari bisa kuat bisa untung itu karena kita *backup kok*, ini juga yang *enggak* penting. Yang penting *enggak* ada korupsi kalau beras seperti itu, Pak, misalnya seperti itu, sehingga kedelai harganya pasti Rp10.000,00 perkilo, pemerintah beli. Ini *...(suara tidak jelas)* presiden sudah tetapkan begitu, Pak. Oleh karena itu, kita tanam, Pak. Kalau..., *kan* begini, kedelai itu varietas kita itu hanya 1,6 ton perhektar, sementara jagung 6, 7, bahkan 7 ton perhektar. *Enggak* maulah tanam rakyat, apalagi harganya sama. *Nah*, ini kita diminta untuk datangkan varietas, buat varietasnya dan varietas yang ada di Serang itu di atas 3 ton ya, di atas 3 ton. Mudah-mudahan ditambah dengan harga yang pas Rp10.000,00 ini bisa jalan.

Bapak-bapak sekalian,

Konservasi lahan sebenarnya ada undang-undang alih fungsi itu dan itu tugas di kabupaten, Pak, bupati dan Pergub. *Nah*, jadi ini memang ini bersoal ini kalau kita tidak sama-sama, Pak. Kami *udah* berapa kali membuat penekanan, edaran, dan lain, tapi eksekusinya itu ada di para bupati karena ini berkaitan dengan Undang-Undang 23 tentang Otonomi Daerah lahan dan lain-lain itu. *Nah*, sekarang kebijakannya bagaimana menahan ini, ini membutuhkan kerja yang bareng, bahkan sekali-sekali kita kasih masuk penjara saja ini yang mengalihkan dan ada ancamannya, Pak, bagi pejabat yang ikut terlibat mengalihfungsikan lahan, ancaman hukumannya di atas 5 tahun, 6 tahun. Jadi kalau ada yang menyetujui lahan pertanian eksisting terus dialihkan menjadi properti misalnya, dialihkan menjadi pompa bensin misalnya, itu kena itu, Pak, pejabat yang ikut menandatangani di situ, ini Undang-Undang Nomor 41/2009, Pak, ada pasalnya. Saya kira ini menjadi catatan. Dan Pak Sekjen, untuk juga sosialisasi lagi lebih kuat karena tentu saja ada di daerah.

Kemudian Bapak/Ibu sekalian yang sangat saya hormati,

Tentu perhatian kita tidak saja berkata menyuruh nanam, tapi bagaimana melakukan pembelian dari hasil tanam dan sekaligus saya *sih* berharap Bapak, yang lain adalah masalah pupuk. Jadi kurang lebih pupuk itu tidak dikurangi, hanya sesuai dengan hasil kesepakatan kita juga di sini dan hasil evaluasi Ombudsman, hasil evaluasi Badan pemeriksaan-pemeriksaan lain diefektifkan dari 69 jenis menjadi 9 jenis ya *gitu*. Itu hasil kesepakatan kita dan bukan Kementan saja, Bapak, ada Komisi IV, iya ada Panjanya. *Nah*, sekarang kondisi lapangan kan tidak seperti apa yang menurut kita bahwa karena dana kurang *enggak* usah dibahas kenapa sampai harus disimplifikasi, di-*shortcut* seperti itu, karena memang kondisi global, pangan, *eh* pupuk itu di dunia langka Bapak ya beberapa negara bahkan menghilangkan subsidi pupuknya *totally*. Dan itu yang membuat jantung *...(suara tidak jelas)*, Sri Lanka itu karena pupuk tiba-tiba di *totally* subsidi pupuk hilang dan itu menjadi masalah.

Saudara, dan Ibu/Bapak sekalian,

Oleh karena itu, ini membantu kami. Kemarin kami bahkan ada surat kepada Bapak Presiden untuk melakukan relaksasi terhadap hal-hal yang tertentu, jadi seperti itu. Tentu saja kita akan sosialisasi lebih kuat dan tentu saja kita tidak berusaha untuk tidak keluar dari aturan tapi tidak juga kaku kalau itu untuk rakyat, *Insy Allah*, kami minta kita jaga sama-sama hal seperti ini menyangkut pupuk ini.

Jadi sekali lagi, pupuk tidak kurang, Bapak, tapi disesuaikan sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada yang memang menjadi kebijakan dasar kita. Jadi yang memang *enggak* keluar dari kebijakan dasar untuk ketahanan pangan semua berkaitan dengan pertanian, tetapi ada yang secara khusus dilakukan. Kenapa harus Urea? Urea itu memberi kesuburan, itu semua ilmu mengatakan seperti itu. Kenapa NPK? itu menjaga buah, total itu 2. Yang lain boleh ditambah? Boleh. Bagaimana menambahnya? Kemarin kami bicara dengan Bapak Presiden dalam satu pertemuan khususlah ya minta waktu, agar direlaksasi dari KUR, ada suratnya sama saya, Pak, mungkin saya cari tertutup nanti Pak Sekjen buka aja surat itu supaya petani juga tahu bahwa kita ini berjuang, mudah-mudahan saja. Oleh karena itu, Bapak Presiden, oke kalau begitu perbaiki KUR-nya, saya setuju. Jadi ini dalam proses pembahasan, mudah-mudahan ada KUR khusus untuk, mudah-mudahan, kami *enggak* janji, tetapi minimal dia tidak lebih dari kalau KUR biasa kan 6%, mudah-mudahan dia tidak lebih dari 3% yang kami minta dalam surat, dibuka *aja*, jangan, nanti *aja*, nanti, itu, Pak. Jadi kami lagi berjuang ini, mudah-mudahan.

Yang lain ada Taksi Alsintan. Saya berharap semua Anggota DPR Komisi IV punya Taksi Alsintan, artinya tunjuk yang mana itu kami *udah* simulasi, Pak, kami sudah simulasi. Sekarang kemarin ini presiden bahkan mudah-mudahan sudah ada kebijakan setuju bahwa yang Taksi Alsintan yang kemarin kita luncurkan *kan* BP-nya 30%, rasa-rasanya presiden setuju itu hanya 10%. Bunganya yang biasanya kalau ini bunga komersil di atas 6 sampai 9%, dia, Bapak Presiden, *udah* turunkan *aja*, mudah-mudahan bisa 3%. Kemudian juga relaksasi plafonnya, itu terus, ini suratnya kasih tembus *aja deh*, Pak Sekjen, coba lihat, dan beliau setuju kemarin ini, Pak, luar biasa, Pak Presiden itu memberi perhatian kepada kita juga cukup memang dengan perhitungan-perhitungan tentu dengan tantangan. Plafonnya dari biasanya hanya 500 *kan*, kalau KUR *ndak* boleh lebih dari 500, Pak, tapi ini dapat 500. Tapi kalau Taksi Alsintan itu minimal 2 miliar sampai 5M, karena sampai dengan RMU-nya, Pak. Oleh karena itu, tidak mudah juga, macam bukan bagi-bagi *nih*, harus ada *cash flow*-nya minimal lahan *hectare line*-nya itu 200 hektar dan kita pakai bantuan dengan *digital system* gitu, digitalnya kita harus main, sehingga satu hari kita bisa kontrol *combine* itu jalan 4 hektar *enggak*, kalau jalan 4 hektar pasti dia buntung, jadi harus dikontrol. Bahkan tidak hanya itu, bengkelnya juga harus ikut dalam 2, 1 paket Alsintan, kurang lebih gayanya itu kayak Presiden Taksi Bapak zaman dulu, siapa punya mobil, ikut *aja*, dia masuk di situ, kreditnya dibantu oleh asosiasi. Asosiasi kelompok Taksi Alsintan ini adalah presiden dan negara, kalau kita tidak *revenue ngapain* kita butuh 1 juta *kok* Taksi Alsintan ini, artinya 1 juta Alsintan harus jalan. Dan Taksi itu paketnya ada *combine*, ada traktor roda 4, ada traktor roda 2, ada power

power thresher, ada Pompa air, ada cultivator-cultivator dan seperti itu dan 1 bengkel, Pak. Bengkelnya harus kerja sama dengan petani milenial dan hasil-hasil Polbangtan kita untuk masuk ke situ kerja sama dengan Menteri Tenaga Kerja juga ini memang dipersiapkan. Jadi saya pikir ini memang harus didorong lebih kuat ke depan.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya kira kurang lebih itu yang saya ingin sampaikan. Masalah sapi, masalah susu, Pak Slamet, saya kira ini menjadi tanggung jawab kita sama-sama. Saya Buser ini, Pak, *Insyallah*, jadi ada memang beberapa program regulasi reguler kita perkuat, kita jaga optimalisasinya dan produksinya, tetapi ada Buser program yang berkaitan dengan tiga hal:

1. Menjaga inflasi agar tidak naik Bapak dari pertanian karena kontribusi inflasi dari Pertanian itu 30%, kita bersaing. Oleh karena itu, mulai cabe, bawang, dan lain-lain itu Horti harus main, persiapkan. Kira-kira seperti itu, Pak.
2. Memang substitusi impor kita, gandum akan besar, kedelai kita tanam yuk, *gitu*, Pak. Ini memang *extraordinary*, Ibu Ketua, memang dan kita harus turun sama-sama. Karena kalau tidak, besok 2022 ini saya jamin aman, Pak, neraca kita semua positif. Tapi 2023 masih seperti itu, Pak. *Nah*, ini harus kita jaga.
3. Ekspor harus jalan, *Insyallah* saya doakan 10 November kita ekspor paling besar, 10 November. Dan kita mulai dengan berbagai kontrak yang ada dari negara lain memang sangat kita batasi. Tetapi yang sudah bisa meluncur kita luncurkan, termasuk porang dan lain-lain sebagainya ya. Porang sekarang ini masih bersoal, Bapak, tapi besok *human care* dunia itu masuk pada makanan-makanan dengan nutrisi khusus antara lain porang itu. *Insyallah* mulai sementara pabrik porang, pabrik beras porang yang ada di Madiun *on setting* sekarang. Kenapa dia terlambat kemarin? karena harus *lockdown* Covid yang ada dari negara-negara yang ada. *Nah*, permintaan itu dari mana-mana dari Jepang pun sangat besar. Terus kalau di dalam beras kita, kita punya beras Basmati *kok*, Pak, ya, kita punya beras Japonica dan Barnas kita yang setara dengan itu, tinggal mau makan seperti apa, Pak. Cuma memang kita *enggak* boleh produksi besar-besaran ini, karena pembelinya juga yang makan juga ya tidak terlalu besar, Pak, itu. Jadi kita memang konsentrasi dengan yang sekarang ini.

Yang terakhir sekali, tanggal 11-12 Oktober ini, November ini, Oktober nanti, nanti akan ada *summit* di Washington di mana Indonesia akan diminta untuk lakukan pemaparan untuk kepentingan World Bank dan kepentingan IMF tentang resiliensi pertanian dan tanaman pangan, sistem ini akan dipakai untuk pembiayaan dari World Bank dan IMF untuk skala dunia. Kemarin kami terima delegasinya dan dipimpin oleh Saudara Pimpinan...*(suara tidak jelas)*, artinya *whatever* mungkin banyak yang kurang banyak yang salah, tetapi resiliensi ini memberikan tren yang cukup baik.

Saya ingin mengatakan, Bapak, *Insyallah* apa yang ada di hari ini saya sangat bahagia banget mendapatkan banyak masukan dan masukan ini

sangat-sangat penting dari semua yang ada di sini dan *Insyah Allah* ini menjadi catatan Pak Sekjen, Pak Dirjen untuk kita sama-sama. Kurang lebih saya minta maaf, kami akan jawab secara tertulis kalau masih dibutuhkan atau ada tambahan yang dibutuhkan.

Terima kasih. Kembalikan ke Ibu Ketua. Sekian.

INTERUPSI F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Izin, Bu Ketua.

Saya belum dijawab, Bu Ketua, terkait dengan Pak Menteri terkait dengan domba perah dan sapi perah yang ada di Baturraden, Pak. Jadi seperti apa untuk apa rencananya Pak Menteri *gitu*. Tadi saya *kan nanya* terkait dengan permintaan para kelompok tani, baik melalui pribadi maupun kelompok yang sangat antusias terkait dengan kambing perah dan sapi perah yang ada di ...*(suara tidak jelas)* Baturraden. Permintaannya ngantrinya bisa setahun, bisa satu setengah tahun, Pak Menteri. Mereka tidak minta, tapi mereka beli, Pak, itu dan itu adalah petani-petani kita kelompok tani yang serius. Tentu ini yang serius yang mudah tidak minta kenapa tidak dikasih. Yang minta saja dikasih *kok*, Pak, hanya sah-sahan bahasanya dikasih. Kenapa ini yang bayar *duit* saja juga tidak menjadi... Ini perlu menjadi perhatian *gitu* maksud saya, Pak Menteri, jadi nantinya juga seluruh kita ini juga menjadi perhatian, jadi petani juga merasa, petani-peternak ini juga merasa diperhatikan, mereka beli, mereka *ngantri* dengan bahagia, Pak. Kalau dari yang satu setengah tahun tolong di-*shortcut dong* apakah bisa pertriwulan mereka ngantrinya, apa persemester, Pak, atau per apa *gitu*, jadi nantinya biar mereka juga tidak menunggu terlalu lama. *Wong* mereka mau beli *kok*, Pak, bukan minta *loh*, Pak. Itu adalah beli, Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah?

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Sedikit lagi, Bu Ketua.

Terkait dengan Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa....

KETUA RAPAT:

Tadi sebenarnya sudah saya persilakan *loh*.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Oh ya, pokoknya dikasih *gitu aja*, Bu.

KETUA RAPAT:

Jangan diulang ya.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Iya. Besok ngulangnyanya, Bu.

Jadi terkait dengan tadi keterbatasan, Pak, mungkin terkait keterbatasan dengan bupati dan lain-lainnya tadi terkait dengan otonomi daerah. Saya yakin Pak Menteri juga dulu mimpin bupati, mimpin gubernur, bagaimana cara mengatasi itu, cari solusinya, Pak. Berikan mereka, kalau memang Pak Menteri punya target, berikan mereka *reward*, Pak, DAK-nya Pak Menteri bisa digunakan. *Oh* kabupaten yang memang proporsional targetnya tetapi kamu minta apa? Mau mintamu apa, berapa, 10 miliar, 20 miliar, 50, *tak kasih. Nah*, itu *kan* perlu, Pak, untuk mendorong mereka. Provinsipun juga begitu, Pak, yang memang tingkat produktivitasnya naik, surplusnya naik, baik kedelai, baik jagung, baik padi, berikan *reward* mereka, Pak. Kalau cuma dikejar-kejar saja *enggak* bisa, Pak, kalau orang Jawa bilang bilang itu *ya tutur, ya uwur, ya sembur*, Pak. Kalau tutur saja *enggak* pernah *uwur*, Pak, *enggak* pernah *ngasih*, hanya tutur bicara terus, Pak. Target *enggak* pernah tercapai, Pak. Itu juga perlu *reward* yang benar. Karena dulu di kementerian juga pernah, Pak, Kementerian Pertanian memberikan *reward* siapapun yang bisa tercapai dan itu hal yang baik, kenapa tidak.

Mungkin itu, Bu Ketua. Tambahan, Bu Ketua yang cantik, yang baik hati.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Menteri, direspon dulu.

MENTERI PERTANIAN (Prof. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si, M.H.):

Saya memang butuh itu Pak, segera kita bicarakan Pak Dirjen, kita laksanakan juga, perintah ini sangat baik untuk saya. Kita yang butuh kok, kita *sorted* sapi, Pak, substitusi ... (*suara tidak jelas*) nya itu kambing, domba, ayam, telur. Ayo, Pak. Bahwa ada tantangan kami anggaran *kan* tidak seperti yang lalu, Bapak, ya kita main dan seperti itu, Pak, yang penting kita mau sama-sama. ...(*suara tidak jelas*) KUR itu sangat bagus, Pak, ya penggunaan KUR saya Rp85 triliun kemarin yang *sorted* yang yang bersoal 0,6. *Nah*, itu *aja* kita ...(*suara tidak jelas*). Petani kita jujur-jujur, Bapak, saya sependapat, Pak. Yang lain saya coba sikapi.

Begitu, Bu Ketua. Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak Menteri.

Bapak/Ibu sekalian,

Semua pertanyaan sudah dijawab meskipun belum tentu... belum...belum lengkap ya, tetapi kita minta untuk ditulis secara tertulis.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Dari ID Food belum. Dari ID Food kayaknya belum.

KETUA RAPAT:

Iya, belum. Nanti setelah ini saya mau minta ID Food untuk bicara. Sabar ya. Sabar itu pasti kesal *deh*.

Ada beberapa hal yang memang menjadi konsen saya juga itu tentang pupuk memang ya kita tahu anggarannya memang *enggak* ada banyak, *enggak* cukuplah kebutuhan yang bisa tidak bisa meng-*cover* semuanya, makanya perlu tata kelola yang lebih yang lebih baik *gitu*. Kita lihat, kita evaluasi, nanti kita kita bicarakan *bareng-bareng* supaya masyarakat ini juga, memang terus terang di manapun pasti ditanyanya tentang pupuk, Pak Bakir, semuanya tentang pupuk, luar biasa ini memang. Tapi makanya kita harus paham betul dan kita tahu. Ini saya minta begini Pak Menteri, komunikasi kepada masyarakat secara luas, baik itu di kabupaten, provinsi, dan semuanya di lapangan terutama ke petani tentang kalau kita yang di ruangan ini Insya Allah udah tahu lah masalahnya seperti apa, tujuannya apa tentang diskusi kita, tentang Panja kita. Tetapi komunikasi dengan dengan model yang *proper* mungkin itu perlu ditingkatkan supaya tidak saling menyalahkan, kalau kita salah komunikasinya juga akhirnya Komisi IV juga disalahkan, atau mungkin Kementerian Pertanian disalahkan *gitu*, jadi ini yang perlu perlu kita cari.

Selanjutnya Pak Frans, ada yang mau dibicarakan. Setelah itu Pak Bakir ada yang mau disampaikan? Cukup? Silakan, Pak Frans dulu.

DIRUT PT RNI/HOLDING ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):

Baik. Terima kasih.

Bu Pimpinan dan Bapak/Ibu semua Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Menjawab beberapa pertanyaan sekalian tadi Bapak/Ibu yang saya catat, ada pertanyaan dari Pak Mindo, Pak Ibnu, kemudian dari Pak Slamet yang kurang lebih pertanyaannya sama dengan Pak Edward Tannur.

Pertama, sedikit meng-*update* tadi itu pertanyaan Pak Mindo. Memang sekarang kami, juga sudah sejak tiga bulan berkoordinasi mengenai program sapi Bali untuk dunia dan proses terakhir adalah mungkin kami akan verifikasi Rumah Potong Hewan untuk program ini karena tentunya untuk program ini kita harus bisa memastikan bahwa Rumah Potong Hewan yang terlibat nanti memenuhi syarat-syarat kesehatan kesehatan hewan dan halal juga, Bu. *Step* berikutnya, kami sekarang melakukan *marketing* komunikasi tentunya untuk

berkomunikasi dengan hotel atau restoran yang nanti menyediakan menu untuk delegasi G20 untuk bisa mereka memakai menunya salah satunya adalah daging Bali, sapi Bali yang sudah di-*treatment* dengan proses pakan yang membuat daging lebih tender. Itu yang pertama buat Pak Mindo, lengkapnya nanti kami akan sampaikan secara tertulis.

Kemudian untuk Pak Ibnu, terkait badan pangan yang mungkin karena belum jelas ke mana belum pernah dipanggil Komisi IV. Namun, kami jelaskan badan pangan dalam program-programnya nanti akan bersinergi dengan ID Food dan Bulog sebagai operatornya untuk program-program pangan, baik yang sifatnya stabilisasi, distribusi, untuk beberapa pangan pokok penting. Salah satu yang kami komunikasikan badan pangan saat ini adalah bagaimana agar beberapa bahan pokok penting ini tidak hanya beras yang punya cadangan cadangan pangannya, tapi untuk kurang lebih 10 sampai 12 pangan kita punya cadangan pangan yang sifatnya *revolving*, jadi terus berputar sehingga kualitasnya bisa dijaga. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengatur logistik dan distribusi agar daerah-daerah yang surplus pangan ini distribusinya bisa kita alihkan ke daerah-daerah yang defisit.

Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Pak Slamet, kemudian Pak Edward Tannur. Apa program-program ID Food dalam menghadapi potensi krisis pangan yang menjadi topik hangat saat ini. Jadi, perlu kami jelaskan memang bahwa salah satu tujuan dibentuknya holding pangan Januari lalu adalah untuk ID Food bisa berpartisipasi dalam ketahanan pangan, baik kita bicarakan ketersediaan, mutu keterjangkauan, dan kesinambungan, serta juga kita bicara tentang ... (*suara tidak jelas*) petani. Dan untuk ini kami juga memang banyak berkoordinasi dan dibantu oleh Kementerian Pertanian untuk dalam merumuskan ini.

Ini pertanyaan yang mudah, tapi berat untuk menjawabnya. Tapi kami sampaikan secara sekilas bahwa, tahun ini kami punya PR memang perbaikan fundamental operasional dan perbaikan fundamental keuangan. Karena Bapak/ Ibu semua Anggota Komisi IV tahu bahwa sebagian tim atau anak perusahaan yang ada di dalam ID Food ini, ada perusahaan-perusahaan pangan yang sekian lama tata kelolanya tidak baik, jadi PR kami adalah membenahi. Dan sebagai *update* saja, kami saat ini melakukan restrukturisasi keuangan dan targetnya akhir tahun ini kami bisa diselesaikan agar PR-PR kami di peran lapangan ini tahun depan kami bisa berkontribusi lebih baik lagi.

Saat kita bicara krisis pangan tentunya kita bicara tentang bagaimana kondisi BUMN untuk bisa meningkatkan *market share* kita dalam tatanan Tata Niaga pangan di Indonesia. Kami sampaikan saat ini pangan di kami yang kontribusinya cukup signifikan memang baru di gula dan garam, di gula kurang lebih 15%, untuk garam kontribusi lebih 50%.

Hal-hal lainnya, saat ini kami punya berapa program flexit yang kami butuh dukungan dan sedang kami kerjakan salah satunya tentunya saja terkait swasembada gula, di mana sama-sama kita ketahui PR kita bersama kita harus melakukan penambahan 75.000 hektar lahan sampai 2025 agar swasembada gula konsumsi itu tercapai. Dan kami ID Food targetnya adalah bisa

meningkatkan produksi kami dari 300.000 ton setahun menjadi kurang lebih 550 sampai 600.000 di 4 tahun kedepan dengan perluasan lahan dan revitalisasi pabrik yang saat ini kami mulai berproses baik dengan usaha kami sendiri juga juga bermitra dengan mitra strategis.

Kemudian beberapa program pangan lainnya seperti di benih, Pak. Di benih saat ini kebetulan yang ditangani oleh saya yang secara manajemen perusahaan cukup salah satu yang terpuruk Pak, jadi ini PR kami untuk membenahi supaya kontribusi benih tidak hanya beras tapi hortikultura lain bisa kami tingkatkan. Saat ini juga kami dibantu Kementan, saat ini mungkin salah satu-satunya di luar swasta yang sudah bisa memproduksi BoC, walaupun *market share*-nya masih kecil dan ke depan dalam peran kami juga akan meningkatkan *market share* BoC maupun di *off taker* karkasnya di tingkat plasma petani.

Kemudian juga kami punya program juga untuk meningkatkan perikanan tangkap, Pak, karena saat ini kita adalah negara dengan perikanan tangkap pengekspor nomor 2 dunia setelah China, baik lewat program penangkapan ikan terukur bekerjasama dengan KKP, maupun pengelolaan pelabuhan perikanan. Juga di 2 tahun lalu, kami sudah mulai dalam bisnis pakan ikan, sudah punya pabrik pakan ikan, dan tahun depan kami akan mulai pabrik pakan ternak. Hal itu ada beberapa flexit yang akan kami detailkan nanti dalam laporan kami tertulis, dan jika diperlukan nanti untuk pembahasan kami siap untuk menyajikannya kepada Bapak/Ibu sekalian semua. Tapi intinya memang kami butuh bantuan dari Komisi IV, juga Kementan untuk bagaimana semua *member ID Food* ada dalamnya ini saat ini memang butuh perkuatan untuk kami bisa bisa berikan kontribusi sesuai dengan harapan dan ekspektasi semua *stakeholder* terkait pembentukan *holding* pangan ini.

Terima kasih, Bu Pimpinan, Pak Slamet, Pak Edward, Pak Mindo, Pak Ibnu, Bapak/Ibu semua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

INTERUPSI F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Izin, Bu Ketua. Saya, Pak Salim, minta izin.

Saya sedikit saja, Bu, Pak Menteri, Kawan-kawan semua. Masalah ID Food ini perlu kita perkuat, Bu, cuma supaya kami ini lebih paham, Pak, terutama saya mewakili 54. Ini, Bu, *enggak* salah, Bu, mungkin ada bisa Bimtek atau yang macam jam 2 kita laksanakan, Bu, apa namanya, Bu, FGD. Iya, ini kalau Bapak menjelaskan itu kami *nih* kurang paham, Pak. Ini perlu program Bapak itupun apa yang Bapak perbuat, apa masukan dari kami.

Yang terakhir, Bu, ikan sepat, ikan gabus Bu, lebih cepat, lebih bagus.

Terima kasih, Bu.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Frans sudah dengar ya langsung aspirasi.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Saya akan membacakan draf kesimpulan rapat kerja kita kali ini. Pak Edward, tolong *dimatiin*.

INTERUPSI F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sedikit bisa, Ibu? Sedikit saja, terkait dengan ID Food.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih.

Bu Ketua dan Pak Menteri, mohon izin sebentar.

Jadi memang awalnya tadi saya juga begitu, Pak, ternyata ID Food ini besar tadi bicara tentang ada DoC, ada benih, dan lain-lain, sehingga saya pikir memang betul tawaran dari Pak Direktur untuk tadi memaparkan ke kita, karena termasuk Berdikari awalnya saya sangat apa berharap ini menjadi kompetitor dari swasta sebagai inti plasma yang *integrated* begitu ya. *Nah*, saya ingin mendapatkan gambaran itu, tapi kalau beliau sudah membuka ruang untuk memberikan penjelasan kepada kita, saya pikir ini sesuatu yang harus kita respon, Bu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Hal yang bagus saling menguatkan pasti kita respon dengan baik.

Kita masuk ke kesimpulan ya, Bapak/Ibu. Belum pada makan siang ini, kasihan. Baik, Bapak/ibu, saya akan bacakan draf kesimpulan Raker kita kali ini.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Anggaran Belanja Kementerian Pertanian dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI yang semula sebesar Rp15.422.181.379.000,00 yang

mengalami realokasi sebesar Rp103.525.552.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp15.318.655.827.000,00 dengan komposisi per Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.473.598.597.000,00. Tolong diperhatikan angkanya ya, Pak Sekjen.
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp154.221.814.000,00;
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp3.089.821.522.000,00;
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.034.155.508.000,00;
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.136.357.410.000,00;
- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.876.556.075.000,00;
- g. Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Pertanian sebesar Rp2.700.741.155.000,00;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp814.501.215.000,00;
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp946.043.124.000,00; dan
- j. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp1.092.659.470.000,00.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Belanja Kementerian Pertanian tahun 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

Para Anggota? Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan tahun 2022 serta melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang tidak berjalan sesuai target.

Raker yang lalu sudah dibicarakan ini, sesuai, diingatkan.

..... :

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Bapak/Ibu, terima kasih.

Dengan demikian Rapat Kerja kita Komisi IV bersama dengan Menteri Pertanian selesai dan sebelum kita akhiri mohon Pak Menteri untuk memberikan kata-kata penutupnya. Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN (Prof. Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si, M.H.):

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Bapak/Ibu sekalian, teman-teman dari BUMN, Pupuk Indonesia,
Bapak dan hadirin sekalian,

Izinkan kami menyampaikan rasa syukur kami, kami berharap 2023 akan lebih baik lagi kita menghadapi tantangan yang ada. Kami berharap tahun ini kita sudah swasembada pangan, memang ada selalu saja dikaitkan antara ketersediaan dengan stabilisasi harga. Walaupun kami tentu saja di Kementan itu sangat konsen tidak berarti mengabaikan yang lain, tetapi sangat konsen dengan ketersediaan, lebih khusus untuk makanan. 273 juta orang setiap saat menjadi tantangan kita, Bu, termasuk Anggota Komisi IV dan itulah pada proses itu, kami yakin kita bisa selesaikan ini, Pak, minimal makanan *nih*. Dan tahun depan *Insha Allah*, kita tidak hanya swasembada beras, kita masuk swasembada jagung, Bapak. Kami didorong bukan janji, tapi tentu kita akan berusaha seperti itu secara bertahap. Kalau memang kedelai sudah pasti, pasti kita akan masuk seperti itu berarti ada dan lain-lain sebagainya.

Bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Saya kira satu hal yang menurut ini aspirasi yang ada di 2022 ini, Pak Sekjen, para Dirjen percepat karena ini berkait. Oleh karena itu, 1 bulan ini tuntaskan, Bapak. Kalau ada kendala CPCL dan yang lain, kita lakukan *case by case*. 1 bulan harus selesai, Pak Sekjen, supaya kita tidak hanya *ngomong aja* di sini dan lain-lain. Tentu ada kendala, Pak, lapangan *enggak* seperti orang *kan* biasa marah di hasil, Pak, tidak tahu bagaimana berproses. Komisi IV dengan kami ini berproses di lapangan dan itu hitam putihnya, sedih dan kecewanya ada, Pak, menghadapi orang-orang yang kemarin baik saja belum tentu baik padahal *udah* disiapkan. Oleh karena itu, 1 bulan ini tuntaskan, Pak, biar apapun yang ada sesuai dengan yang sudah ditargetkan, menurut Dapil yang ada di Komisi IV. Saya berharap Pak Dirjen semuanya selesaikan. Jadi ini menjadi bagian dari harapan saya bahwa karena kita sudah di bulan 9 ini. Kalau ada masalahnya kita bicarakan *case by case*, Pak, keputusan kita ambil dan Dapil harus sukses dari Komisi IV. Kami juga ikut mengawal apa-apa yang menjadi *policy* Pertanian di Komisi IV yang ada pada Dapil yang masing-masing.

Saya kira itulah. Terima kasih, Pak. Kalau kurang lebihnya apa yang ada kami mohon maaf dan mohon terus pengawalan dari Komisi IV terhadap tentu kegiatan kementerian.

Terima kasih pada Pupuk Indonesia kami sangat *nyatu*, Pak, menghadapi ini di lapangan dan mudah-mudahan ID Food juga seperti itu. Ridho Allah bersama kita. Sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Saya pikir kita juga perlu mengatur, bukan perlu, memang sangat layak diapresiasi, Pak Menteri, karena mendapat kepercayaan untuk bisa memaparkan *best practice*-nya untuk resiliensi apa ketahanan pangan di Indonesia yang besok akan disampaikan di apa di Washington ya. Karena tidak semua negara mampu untuk menjawab tantangan tersebut, apalagi ini menjadi menjadi *best practice* se-dunia *gitu*. Dan tentu Pak Menteri, kami semua dari Komisi IV ya, kita kerja bareng dan saya yakin dengan bersama-sama kita bisa menjawab tantangan terutama tentang krisis pangan.

Terima kasih, Bapak/Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati.

Dengan ini saya tutup rapat kerja kita kali ini dengan bacaan.

*Wallahul muwafiq Ila aqwamith thariq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002